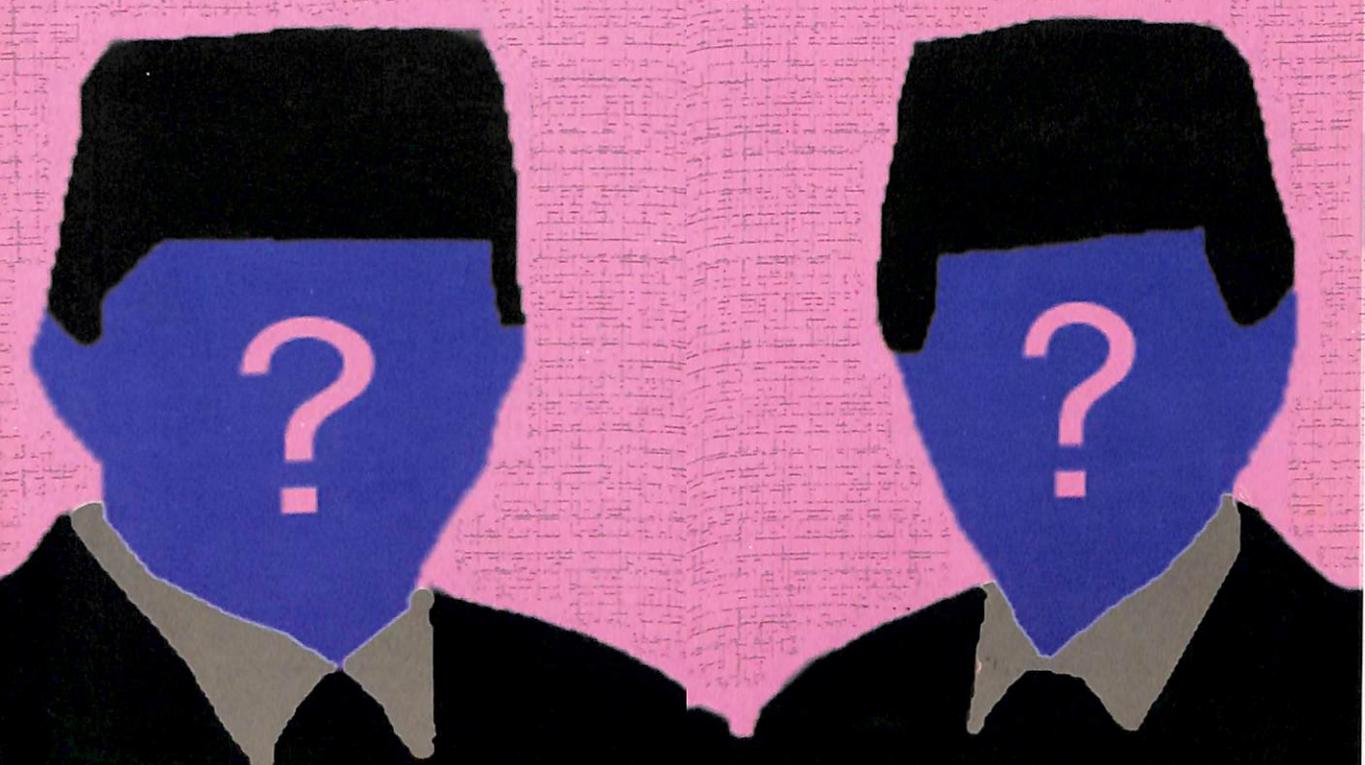


Buletin

# H a b a



## Pilkada RAA

# H a b a

Informasi Kesejarahan  
dan Kenilaitradisional

No. 41 Th. VII  
Edisi Oktober 2006 – Desember 2006

## PELINDUNG

Dimen Nalar Budaya, Seni dan Film  
Direktor Tradisi  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

## PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Banda Aceh

## DEWAN REDAKSI

Teuku Djuned  
Rusdi Sufi  
Asiam Nur

## REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional  
Agus Budi Wibowo  
Sudirman  
Piet Rusdi

## SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha  
Bendaharawan  
Yulhanis  
Netti Darmi  
Cut Zahrina  
Lizar Andrian

## ALAMAT REDAKSI

Jl Tuanku Hasyim Banta Muda No 17 Banda Aceh  
Telp (0651) 7410455

Diterbitkan oleh :

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto Redaksi dapat juga menyangkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiasnya

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

## DAFTAR ISI

### Pengantar Redaksi

#### Info

Dari Saresehan Guru Bidang Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial Budaya Hingga Partisipasi dalam Pekan Budaya Sumatera Barat 2006

#### Wacana

Sudirman **Pilkada : Pendidikan Politik Masyarakat Aceh**

Titit Lestari **Pilkada : Antara Pemilih dan yang Dipilih**

Iskandar FP **Dibalik Kemenangan GAM**

Irim Dewi Wanti **Menyongsong "Aceh Baru" (Beberapa Catatan Perjalanan Pilkadasung di NAD)**

Agus Budi Wibowo **Suara Ulama dalam Pilkada Aceh**

#### Pustaka

Barus : **Sejarah Maritim dan Peninggalannya Di Sumut**

#### Cerita

**Putroe Bulukeh**

#### Cover

**Ilustrasi Calon Pemimpin**

Tema Haba No. 42 **Kearifan Tradisional di NAD-SUMUT : Tantangan dan Harapan Daya Tarik Pariwisata**

## PENGANTAR

# Redaksi

Memasuki Reformasi Indonesia memasuki babak baru dalam dunia politik. Dunia politik Indonesia mengalami perubahan yang amat signifikan dibandingkan sebelumnya. Salah satu perubahan yang tampak adalah pemilihan kepala-kepala pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kalau sebelumnya, pemilihan kepala-kepala daerah tersebut dilakukan melalui wakil-wakil rakyat, baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada masa reformasi ini pemilihan-pemilihan kepala pemerintahan ini dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum (Presiden/wakil presiden) dan pemilihan kepala daerah langsung (Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil bupati, walikota/wakil Walikota).

Tentunya, dalam setiap Pemilu dan Pilkadasung banyak terjadi riak-riak yang menyebabkan tidak berjalan lancar acara tersebut. Namun demikian, di balik penyelenggaraan sendiri pemimpin-pemimpinnya. Rakyat yang memiliki masa depan, maka ia harus yang menentukan masa depannya dengan menentukan sendiri pemimpin terbaiknya.

Suaraku adalah masa depanku. Itu adalah suatu slogan yang didengungkan pada masa Pilkadasung di Aceh. Agak berbeda di provinsi lain di Indonesia. Aceh akan menyelenggarakan Pilkadasung serentak di 20 Kabupaten/kota. Hal ini merupakan suatu yang menarik apalagi penyelenggaraannya dilaksanakan pasca penandatanganan MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Terkait dengan hal tersebut, redaksi Buletin Haba telah merangkum beberapa tulisan yang membahas Pilkadasung di Aceh ini. Semoga tulisan tersebut menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. (ABW)

Redaksi

## Dari Saresehan Guru Bidang Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial Budaya Hingga Partisipasi dalam Pekan Budaya Sumatera Barat 2006

Salah satu kunci keberhasilan suatu bangsa menjadi bangsa yang maju dan modern adalah pengelolaan dunia pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan pembuka pengetahuan dan wawasan individu tentang dunia luar. Apabila individu memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka seseorang akan dengan mudah dapat memasuki dunia luar yang ada di sekelilingnya.

Aceh memang identik dengan Islam. Sejarah panjang Aceh memperlihatkan bahwa kehidupan keagamaan terutama Islam menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat sejak lama. Sebagai wilayah yang paling Barat, Aceh merupakan daerah yang pertama menerima ajaran agama Islam sehingga menjadikan daerah ini mendapat predikat sebagai Serambi Mekah. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa sejak berabad-abad lamanya hukum adat atau lebih dikenal dengan adat istiadat merupakan perangkat aturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya telah tumbuh dan berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Untuk ini, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh menyelenggarakan sarasehan guru sebagai upaya memelihara budaya Aceh agar tetap menjadi roh bagi pembangunan di daerah ini. Keberadaan budaya Aceh yang tetap mendarah-daging pada *ureung* Aceh merupakan modal dasar yang sangat baik untuk dapat ditumbuhkembangkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui revitalisasi kesadaran kebangsaan. Revitalisasi kehidupan kebangsaan difokuskan pada guru-guru. Diharapkan guru-guru sebagai *agent of change* dapat mengajak para murid, anggota masyarakat agar menyaring budaya-budaya luar sehingga Aceh tetap dengan roh ke-aceh-annya.

Kegiatan Saresehan berlangsung 22-23 November 2006 yang lalu para pembicara terdiri dari pakar pendidikan, akademisi dan

Kepala BKSNT Banda Aceh dan yang mewakili pemerintah daerah yaitu kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar. Meskipun telah lama lewat namun rumusan dan rekomendasi dari hasil kegiatan tersebut penting untuk diketahui bagi para pembaca yaitu :

### a. Rumusan

1. Sejarah lokal bagian dari sejarah Indonesia yang harus diajarkan kepada anak didik, sehingga orang bangga sebagai bangsa Indonesia dan daerahnya.
2. Pengetahuan sejarah dan budaya sangat berperan dalam pembentukan kesadaran kebangsaan. Untuk itu, nasionalisme dan kesadaran kebangsaan Indonesia dapat dibina melalui pengajaran sejarah. Dalam hal ini peran guru-guru sejarah dan budaya sebagai ujung tombak dalam menanamkan nilai kesejarahan dan budaya adalah sangat besar.
3. Pendidikan di Aceh terkait dengan syariat Islam dan kesadaran kebangsaan karena Syariat Islam di Aceh memberikan kontribusi secara menyeluruh. Pendidikan Islam tidak hanya memberikan *knowledge* tetapi juga nilai-nilai akhlak. Dengan demikian, unsur keislaman di Aceh lebih dapat menjadi perekat, baik sesama masyarakat yang multietnik maupun sesama masyarakat Islam menuju negara kesatuan.
4. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan oleh orang Aceh, tidak hanya di Aceh bahkan di Nusantara dan di Asia Tenggara.
5. Alokasi jam belajar mata pelajaran Sejarah dan Sosial/Budaya di semua jenjang pendidikan baik di Aceh maupun Nasional sangat terbatas.

### b. Rekomendasi

Hasil kegiatan saresehan tersebut menghasilkan beberapa hal rekomendasi yang

patut diperhatikan oleh pihak-pihak terkait demi perkembangandan kemajuan bidang Ilmu Sejarah dan Sosial/Budaya.

1. Perlu dipertimbangkan bahwa sekolah dapat dijadikan lembaga yang sangat efektif dan produktif dalam pengembangan pengetahuan kesejarahan dan budaya dalam upaya membentuk pengetahuan dan sikap kebangsaan generasi muda dan untuk memperkokoh jati diri bangsa. Untuk itu mata pelajaran sejarah dan budaya harus menjadi pelajaran pokok dan muatan lokal, dalam hal ini guru adalah *agent* dalam melakukan pendidikan yang berbasis kelokalan.
2. Bagi pihak-pihak terkait, perlu dibahas kembali kurikulum yang digunakan saat ini dengan menambah jam pelajaran sejarah dan budaya karena selama ini yang sangat membatasi proses belajar mengajar. Kurangnya jam pelajaran sejarah dan budaya ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses regenerasi transformasi pengetahuan khususnya Sejarah dan budaya yang dapat memacu degradasi jati diri bangsa.
3. perlu dikritisi bahwa metode pengajaran sejarah dan budaya sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan *text book* tetapi juga dengan mengaplikasikan berbagai metode dan pendekatan dalam pengajaran yang apresiatif, kreatif dan rekreatif yang dapat memberi pemaknaan langsung kepada anak didik melalui metode *out door*, misalnya dengan melakukan berbagai kunjungan ke lokasi bersejarah, menyaksikan langsung atraksi budaya atau mengunjungi perkampungan masyarakat tradisional, dan sebagainya.
4. Perlunya dukungan kebijakan maupun dana dari berbagai pihak, baik dari pimpinan sekolah (kepala sekolah dan jajarannya) serta pemerintah daerah hingga DPRD untuk mendukung pelaksanaan pendidikan sejarah dan budaya yang efektif dan efisien.
5. Perlu dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Pemda terkait upaya diklat bidang Ilmu Sejarah dan

Sosial/Budaya secara berkala dan berkesinambungan baik tingkat lokal (daerah) maupun provinsi dan Nasional.

6. Perlu dibentuk forum guru bidang studi sejarah dan budaya sebagaimana yang telah terbentuk di sekolah untuk mata pelajaran lain yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah diskusi, berbagi informasi, metode dan pendekatan demi kelancaran proses belajar mengajar di tempat masing-masing.

### Pekan Budaya Sumatera Barat

Satu hal yang menarik dan belum pernah (mungkin) dilakukan oleh UPT Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi kegiatan dalam satu *event* dan dalam ruang yang sama. Ini adalah gebrakan baru yang dimunculkan oleh UPT BKSNT, BP 3 dan Balai Arkeologi (Balar) se Sumatera.

Pada tanggal 27 s.d. 3 Desember 2006 lalu sebagai partisipasi dalam Pekan Kebudayaan Sumatera Barat dilakukan pameran bersama antara UPT Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yaitu BKSNT. Aceh, BP 3 Aceh, Balar Medan, BKSNT Padang, BP 3 Batusangkar, Balar Palembang, BKSNT Tanjung Pinang, BKSNT Bandung (Jabar dan Lampung) dan BP 3 Serang (Jabar dan Lampung). Kegiatan ini terangkum dalam tema Mozaik Budaya Multikultural.

Satu pengalaman yang cukup prestisius, dari kegiatan ini selain antara UPT dapat mengapresiasi berbagai program kerja yang telah dilakukan, juga antara UPT yang berbeda tupoksi (BKSNT, Balar dan BP 3) dapat saling *sharring* pengalaman. Hal yang menggembirakan adalah walaupun tidak pernah "tercetus" kepermukaan antara "sejarah" dan "budaya" *satu tapi tak seiring sejalan*, ternyata bila bersatu *cukup harmonis*. Maka rencananya kegiatan seperti ini akan tetap berlanjut dan pada tempat dan event yang berbeda. (IDW)

## Pilkada : Pendidikan Politik Masyarakat Aceh

Oleh : Sudirman

### Pendahuluan

Perubahan politik yang ditunggu-tunggu masyarakat Aceh akan segera tiba. Pada tanggal 11 Desember 2006 masyarakat Aceh telah melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah, untuk memilih pemimpin, baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten dan kota. Dalam hal ini setiap orang yang telah memiliki hak pilih telah memberikan suaranya untuk memilih kepala daerah.

Aceh memang tidak jauh beda dengan daerah lain, termasuk dalam hal Pilkada. Maklumlah, semenjak 30 tahun Orde Baru berkuasa, praktek berdemokrasi nyaris tanpa warna. Setelah UU PA disahkan, geopolitik Aceh menjadi sangat variatif. Banyak pihak berharap, pasca MoU Helsinki dan UU PA disahkan, proses demokratisasi di Aceh, dapat lebih besar memberi ruang gerak. Sebab selama ini terkesan sentralistik. Namun, sejalan dengan pemberlakuan UU PA, praktek demokrasi itu mulai bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu gejala ke arah itu adalah lahirnya partai lokal dan muncul calon independen.

Terkait pilkada, Desember 2006, moment itu tentu menjadi peluang, sekaligus tantangan bagi para politisi dan aktivis Aceh, tidak terkecuali mantan anggota dan pemimpin GAM karena MoU Helsinki dan UU-PA memberi kesempatan kepada semua rakyat Aceh untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

### Pilkada 2006

Melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 11 Juli 2006, para wakil rakyat tersebut menetapkan satu undang-undang kembali bagi rakyat dan pemerintahan Aceh. Dengan demikian, saat undang-undang baru ini ditetapkan presiden maka UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus tidak

berlaku lagi. Meski demikian, ada kesamaan semangat dan ruh dalam dua undang-undang itu, yaitu sama-sama merawat perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bedanya, UU No. 18/2001, lahir di tengah konflik yang masih melanda Aceh, sementara UU PA lahir setelah adanya MoU damai RI-GAM. 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kecuali itu, munculnya UU-PA tidak lepas dari pantauan dunia Internasional, khususnya Uni Eropa. Sedangkan UU No. 18/2001, lebih kepada kompromi politik internal, sesama anak bangsa.

Pada Pilkada 2006 yang baru lalu, calon kepala daerah dapat maju melalui jalur independen. Karena, pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI telah menyepakati adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Untuk itu, muncul beberapa pasangan calon kepala daerah melalui jalur independen, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, setelah melalui seleksi, delapan pasangan calon ditetapkan untuk maju dalam Pilkada, lima pasangan calon diusung partai politik dan tiga pasangan kandidat maju lawan jalur independen sudah berlaga untuk Pilkada Desember 2006. Adanya calon independen sangat konstruktif bagi terselenggaranya sebuah pemilihan yang kompetitif, demokratis dan fair. Hal itu karena dapat mengurangi dominasi partai politik.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Calon gubernur lewat jalur independent ialah Drs. H. Ghazali Abbas Adan/H. Shalahuddin Alfata, Drh. Irwandi Yusuf, M. Sc./Muhammad Nazar, S. Ag., H.M. Djali Yusuf/Drs. H. RA Syaukqas Rahmatillah, M.A., sedangkan yang maju lewat jalur partai ialah Ir. H. Iskandar Hoesin, M.H./Drs. M. Saleh Manaf, Dr. Ir. H. Ahmad Human Hamid, M.A./Drs. H. Hasbi Abdullah, M. Si., Ir. H. Azwar Abubakar, M.M./M. Nasir Djamil, S. Ag., Letjen TNI (purn) H. Tamlicha Ali/Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar, Drs. H. A. Malik Raden, M.M./H. Sayed Fuat Zakaria, S.E. Demikian juga calon di tingkat kabupaten/kota.

Ada fenomena baru dan menarik terkait Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Desember 2006. Fenomena itu terkait dengan adanya ujian baca kitab suci Alquran bagi seluruh calon, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peristiwa itu paling tidak ingin memaknai keistimewaan Aceh dan kekhususan Aceh sebagai daerah syariat Islam.. Sebagai daerah yang dijuluki Serambi Mekah dan adanya pemberlakuan syariat Islam, tentu sangat ironis jika kepala daerahnya tidak mampu membaca Alquran.<sup>2</sup>

Di samping itu, test baca Alquran tersebut juga ingin mengukuhkan kembali tradisi kepemimpinan di Aceh, setiap pemimpin juga berfungsi sebagai imam bagi makmumnya tempo dahulu, hampir sulit menemukan pemimpin, mulai dari tingkat geuchik hingga ke atasnya, yang tidak mampu membaca Alquran dengan baik dan benar. Dahulu, geuchik selain mengurus administrasi pemerintahan di tingkat gampong, ia juga berperan sebagai imam di meunasah dan khatib salat Jumat di mesjid. Upaya peneguhan kembali potret kepemimpinan di Aceh tersebut di atas direalisasikan sebagai salah satu syarat ikut Pilkada di NAD.<sup>3</sup>

Setelah pengesahan UU-PA tanggal 11 Juli 2006, mengisyaratkan bahwa RI-GAM mempunyai komitmen tinggi untuk saling menjaga dan mengisi perdamaian. Namun, bagi GAM selain harus memelihara proses perdamaian, pada waktu bersamaan mereka juga harus mencurahkan energi untuk politik praktis, menyiapkan calon kepala daerah.

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, "Baca Alquran bagi Kandidat", *Serambi Indonesia*, 10 September 2006. hlm. 18.

<sup>3</sup> Syarat mampu membaca Alquran merupakan amanah dari Qanun Aceh No. 7/2006, dalam salah satu pasal qanun itu disebutkan bahwa setiap calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota, harus mampu membaca Alquran dengan fasih dan baik. Dengan syarat ini banyak peserta calon berguguran karena tidak mampu membaca Alquran dengan baik dan fasih.

Hal itu sesuai dengan pernyataan secara resmi, panglima GAM, Muzakkir Manaf menegaskan, mulai Januari 2006, seluruh aktivitas GAM telah berhenti. GAM tidak lagi mengusung senjata dalam perjuangannya. Seluruh anggota militer GAM telah menjadi warga sipil. Sesuai kesepakatan Helsinki, seluruh anggota GAM tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menampung aspirasi dan perkembangan serta kelangsungan politik GAM, sebuah hajatan besar diselenggarakan GAM dengan nama *Musyawahar GAM Ban Sigom Donja* pada tanggal 22-24 Mei 2006 di gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh. Pada acara tersebut membahas semua persoalan GAM di daerah dan di berbagai belahan dunia. Mereka menganalisis berbagai topik penting berkaitan perdamaian Aceh.

Dari sekian topik yang dibahas, masalah Pilkada paling banyak menyita perhatian peserta. Topik menjadi sangat menarik, sebab GAM semenjak awal sudah bertekad mengajukan calonnya dalam Pilkada Aceh Desember 2006. Setelah melalui proses konvensi, Teungku Nashiruddin bin Ahmed dan Muhammad Nazar terpilih menjadi kandidat calon gubernur dari GAM. Tetapi, Teungku Nashiruddin bin Ahmed mengundurkan diri dan nama Hasbi Abdullah muncul sebagai penggantinya. Di tengah penantian itu, tiba-tiba pimpinan GAM mengeluarkan pernyataan bahwa GAM tidak ikut ambil bagian dalam Pilkada.<sup>4</sup>

Namun, sejumlah petinggi GAM pada 22 Agustus 2006 bertemu di Wisma Daka, Lampriet, Banda Aceh. Mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf didampingi salah seorang petinggi Majelis GAM, membacakan secara dukungan terhadap pasangan Humam Hamid dan Hasbi

<sup>4</sup> Selain masalah Pilkada pada musyawarah itu juga dibahas mulai dari kesejahteraan mantan GAM, reintegrasi, milisi, peranan wanita, peran GAM dalam rekonstruksi Aceh, dan lain-lain. Pertemuan tersebut dihadiri semua utusan GAM, baik dari dalam maupun luar negeri. *Majalah Aceh Kita*, Juni 2006. hlm. 12-13.

Abdullah, yang maju sebagai calon gubernur dan wakil melalui Partai Persatuan Pembangunan dan mendapat dukungan dari Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud.

Kendati menyatakan dukungan terhadap paket itu, Muzakkir Manaf menegaskan bahwa GAM secara institusi tidak ikut dalam Pilkada. Namun, secara personal GAM dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan.<sup>5</sup>

Sampai di sini, perbedaan pandangan di tubuh GAM belum kentara. Setelah pertemuan di Wisma Daka, friksi di tubuh GAM mulai tampak, puncaknya ketika pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dideklarasikan di halaman kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat di Lamdingin, Banda Aceh, 27 Agustus 2006.

Majunya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar mendapat sokongan dari sejumlah petinggi GAM. Juru bicara GAM di Swedia, Bahtiar Abdullah (saudara kandung Hasbi Abdullah) malah mengirim surat dukungan terhadap pasangan ini.<sup>6</sup>

Menanggapi situasi dan fenomena yang tidak menentu tersebut, dalam suatu konferensi pers yang sangat mengejutkan pada tanggal 27 November 2006 di kantor KPA Lamdingin, Banda Aceh, ketua KPA Pusat, Muzakkir Manaf, menegaskan, seluruh jajaran KPA di Aceh bersikap netral dalam Pilkada Desember 2006. Menerima dan mendukung sepenuhnya kepala daerah yang akan dipilih oleh rakyat secara demokratis.

<sup>5</sup> Pernyataan Muzakkir Manaf itu berbuah polemik di kalangan GAM, sebab sejumlah petinggi Majelis GAM dan mantan panglima wilayah tidak pernah memberikan dukungan terhadap pasangan yang diajukan PPP. Munawar Liza Zein menyebutkan, GAM tetap pada keputusan yang dicapai pada pertemuan di Hotel Rajawali tanggal 29 Mei 2006. Dalam pertemuan yang dipimpin Perdana Menteri Malik Mahmud, GAM bersetia untuk tidak ambil bagian dalam Pilkada Desember 2006. Keputusan itu diambil setelah Teungku Nashiruddin bin Ahmed mengundurkan diri dari pentas calon gubernur kubu GAM. Awalnya dia terpilih sebagai kandidat calon gubernur dan Muhammad Nazar sebagai wakil pada pertemuan GAM Ban Sigom Donja pada tanggal 22-24 Mei 2006 di gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh. *Aceh Magazine*, September-Oktober 2006, hlm. 18-19.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Oleh karena itu, pihak KPA menarik semua dukungan yang pernah diberikan terhadap seluruh kandidat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>7</sup>

Ada beberapa kemungkinan yang dapat kita amati, mengapa GAM tidak mengajukan calon secara institusi pada Pilkada Desember 2006, GAM pasti sudah memperhitungkan apabila kalah dalam pilkada, sungguh sebuah petaka besar bagi GAM dalam percaturan politik praktis ke depan. Bukan tidak mungkin kekalahan dalam Pilkada 2006 menyebabkan kader GAM tidak mampu berbuat banyak pada Pilkada berikutnya. Dengan demikian, GAM sangat berhati-hati untuk mengajukan calon kepala daerah. Selain itu, ada perbedaan pandangan di kalangan GAM sendiri terhadap calon yang diajukan dalam Pilkada.

Politik GAM benar-benar telah bergeser, pelan tetapi pasti. Sejumlah petinggi GAM di daerah secara resmi mendaftarkan diri untuk maju bertarung dalam Pilkada Untuk posisi gubernur dan wakil gubernur ada paket Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dan Hasbi Abdullah sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan calon gubernur dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sementara di tingkat dua, sejumlah petinggi GAM, juga mulai meramaikan bursa.<sup>8</sup>

Upaya GAM untuk memenangkan Pilkada memang bukan cerita baru, setelah MoU ditandatangani, GAM giat melakukan pendidikan politik bagi anggotanya. Tidak tanggung-tanggung untuk tujuan tersebut, GAM menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga internasional. Salah satunya yang

<sup>7</sup> Pernyataan itu ternyata mendapat tanggapan dari kelompok GAM sendiri, juru bicara Majelis GAM, Teungku Suadi Sulaiman, membantah pernyataan KPA tersebut. *Harian Serambi Indonesia*, Selasa 28 November 2006, hlm. 1 dan 7.

<sup>8</sup> Muncul nama-nama calon kepala daerah tingkat dua dari GAM antara lain Amni bin Ahmad Marzuki, Said Mustafa Usab, Sayuti, Muksalmina, Fauzan Azima, Munawar Liza, Suaidi Yahya, dan lain-lain, namun mereka harus melalui persyaratan yang ditetapkan KIP. *Tabloid Modus*, No. 19/TH.IV/4-10 September 2006, hlm. 27.

paling banyak berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi GAM adalah *The Olof Palmer International Centre*.<sup>9</sup>

#### Perilaku Pemilih

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat pada Pilkada yang baru usai kecenderungan dan perilaku pemilih. *Pertama*, pendekatan identifikasi partai politik, menjelaskan bahwa pemilih mengidentifikasi diri dengan partai politik yang mereka dukung, lalu memberikan suara kepada kandidat yang diusung partainya. Berdasarkan pendekatan ini dalam Pilkada Aceh pemilih akan mempersepsikan diri sebagai warga Partai Golkar (Partai Golongan Karya), PAN (Partai Amanat Nasional), PPP, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PBB (Partai Bulan Bintang), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PBR (Partai Bintang Reformasi), PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), pengikut GAM, dan lain-lain.

Pendekatan *kedua*, loyalitas sosial. Loyalitas sosial, seperti agama, etnisitas komunitas tempat mereka lahir atau kesamaan profesi, faktor yang dapat menentukan perilaku pemilih. Dalam Pilkada Aceh, loyalitas sosial tentu bukan agama karena Aceh identik dengan agama Islam, sehingga tidak ada agama atau sekte lain bagi identitas loyalitas sosial untuk pemilih di Aceh. Dengan demikian, loyalitas sosial lebih merujuk pada etnisitas sehingga pemilih mengidentifikasi diri mereka sebagai orang dari etnik atau komunitas tertentu.

Berdasarkan pendekatan ini, biasanya para calon selalu mengandalkan suku dan tanah kelahiran sebagai modal utama dalam meraih suara. Misalnya, Iskandar Hoesin yang merupakan asal Pidie, mengaku mendapat dukungan dari orang Pidie. Malik Raden yang berasal dari Aceh Besar, merasa bakal dapat memenangkan suara di Aceh besar. Begitu juga yang lain

biasanya selalu berpikir bahwa mereka bakal unggul di wilayah tempat mereka berasal. Namun, sebuah fenomena berbeda muncul dari cagub Djali Yusuf, meski kelahiran Pidie justru lebih mengandalkan dari wilayah barat, tengah dan selatan yang selama ini sangat kuat menuntut pembentukan provinsi Aceh Louser Antara dan provinsi Aceh Barat Selatan.

Pendekatan *ketiga*, kompetensi dan integritas calon. Biasanya di Negara-negara maju dan demokrasi mapan, perilaku pemilih sudah bergeser, khususnya kelompok usia muda dan intelektual telah meninggalkan loyalitas partai dan loyalitas identitas sosial. Pemilih lebih tertarik pada kualitas kandidat yang berlaga di pemilihan, atau isu kampanye yang dikomunikasikan pasangan calon, tanpa mempersoalkan identitas sosial kandidat. Di sini rasionalitas dan idealisme mulai berperan. Pergeseran perilaku pemilih tersebut distimulasi oleh media masa cetak dan elektronik yang sangat efektif mensuplai berbagai informasi penting tentang kandidat dan pemilihan.<sup>10</sup>

Dana juga sangat menentukan dalam Pilkada, modal untuk bertarung di dunia politik tidak cukup sekedar dengan doa. Kata orang, kalau tidak punya modal, ya jangan terlalu berharap akan menang bertarung dalam Pilkada yang diformat untuk dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung. Di sisi lain, jangan lupa bahwa modal untuk menang bertarung itu bukan hanya uang, melainkan juga *team work* yang mendukung eksistensi sang calon. *Team work* yang solid dari tim sukses adalah modal utama. Tetapi, solid saja tidak cukup, karena yang dituntut juga profesionalisme. Namun, tim yang profesional biasanya membutuhkan ongkos yang mahal pula.

Di negara-negara maju, seseorang yang berniat mencalonkan diri menjadi kepala daerah lazimnya berasal dari orang yang banyak uang. Mereka adalah orang yang tidak lagi memikirkan perut. Maka

<sup>9</sup> Di luar perkiraan, ternyata Pilkada 11 Desember 2006, sejumlah tokoh GAM unggul dalam Pilkada, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

<sup>10</sup> Marhaban Ibrahim, "Pilkada dan Kemandirian Politik Rakyat Aceh, *Serambi Indonesia*, Selasa 21 November 2006, hlm. 18.

ketika berkuasa pun, lebih mudah untuk mengurus perut sang rakyat terlebih dahulu, ketimbang memikirkan perut diri sendiri. Namun, itu hanya kecenderungan yang sering terlihat di negara-negara maju

#### Penutup

Pada 11 Desember 2006 rakyat Aceh telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah. Ini merupakan momentum demokrasi terbesar pascapenandatanganan MoU antara RI-GAM. Banyak pihak berharap pertarungan antarkandidat hendaknya merupakan sebuah pertarungan yang bersih.

Kali ini rakyat Aceh mendapat kesempatan untuk memilih figur pemimpin secara satu orang satu suara (*one man one vote*). Sedangkan pada masa lalu kepala daerah dipilih oleh anggota-anggota DPRD. Perlu disadari bahwa pesta besar itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan akhir.

---

Sudirman, S.S. adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

Keinginan yang ingin dicapai adalah lahirnya pemimpin yang adil dan memperhatikan rakyat. Agar tujuan yang dikehendaki terwujud dan berkualitas, pemilu harus berlangsung secara demokratis ; jujur dan adil.

Harapan itu merupakan harapan yang wajar. Setelah dilanda konflik, dengan kehilangan jiwa dan harta tidak terhitung banyaknya, semua orang tentu kemudian menginginkan sebuah suasana yang nyaman dan aman. Sebab dengan suasana yang demikian hidup dapat direncanakan dengan baik, kehidupan mungkin juga lebih baik, dan damai dapat terus bertahan selamanya di Aceh.

## Pilkada : Antara Pemilih dan Yang Dipilih

Oleh : Titit Lestari

#### Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi sesuatu yang sangat istimewa tidak hanya bagi masyarakat Aceh dan Bangsa Indonesia, tapi juga bagi masyarakat internasional. Masyarakat Eropa bahkan mengirimkan tim pemantau khusus hanya untuk memantau pelaksanaan Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu stasiun TV swasta di tanah air setiap hari melakukan laporan khusus hanya untuk melaporkan pelaksanaan Pilkada NAD mulai dari masa Kampanye hingga pengumuman resmi dari KPU tentang hasil penghitungan suara. Dari fenomena ini timbul pertanyaan mengapa Pilkada NAD mendapat perhatian yang khusus baik dari dalam maupun luar negeri?

Perjalanan sejarah Aceh selama bertahun-tahun dilanda konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM memberikan andil yang besar dan kontribusi besar juga menjadikan Pilkada NAD sebagai sebuah peristiwa politik yang menyita perhatian masyarakat dalam maupun luar negeri. Apa sebenarnya yang menjadi faktor penarik dari kegiatan pesta demokrasi tersebut?

Jawabannya perjalanan sejarah. Perjalanan sejarah telah memberikan warna pesta demokrasi yang terselenggara di NAD tanggal 11 Desember 2006. Sejak adanya konflik berkepanjangan dan diakhiri dengan adanya perjanjian damai Helsinki 15 Agustus 2005. Pasca perjanjian damai tersebut masyarakat Aceh dapat merasakan nikmatnya kedamaian dan rasa aman. Rasa takut, curiga dan was-was hilang semua yang ada adalah semangat untuk membangun Aceh yang telah hancur akibat tsunami. Langkah awal dari proses pembangunan

tersebut salah satunya adalah memilih seorang pemimpin yang nantinya mampu menjadi seorang penggerak dalam membangun Aceh agar terus maju dan berbenah diri.

Pilkada adalah sebuah representasi dari kedaulatan dan kebebasan rakyat daerah untuk menentukan pemerintahan atas dirinya sendiri.<sup>1</sup> Pilkada langsung adalah momentum penting dalam rangka memenuhi kerinduan masyarakat daerah akan pemimpin yang mampu mensejahterakan mereka. Dalam sebuah proses pilkada idealnya dan seharusnya juga melibatkan proses sosiologis yaitu mengajarkan kepada masyarakat pemilih untuk dapat bernegosiasi dengan pemimpinnya dalam rangka memperoleh kesejahteraannya itu.

#### Pemilih

Pemilih adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan diberi hak untuk memilih salah satu pemimpin mereka. Saat ini dalam setiap proses Pilkada, pemilih adalah subyek yang kadang-kadang kurang diperhitungkan. Wacana yang banyak berkembang dimedia massa adalah para bakal calon (balon) itu sendiri. Tetapi bagaimana peran pemilih dalam suatu proses pendidikan politik pada peristiwa penting ini, tidak banyak disinggung. Seolah-olah pemilih hanya menerima proses sebagaimana adanya dalam posisi sebagai objek. Pemilih hanya menerima nasib dimobilisasi oleh tim kampanye para calon, diajak ke sana-kemari dan dicukupi kebutuhannya sesaat selama proses pilkada berlangsung.

Padahal sebenarnya ada substansi cukup mendasar, yaitu bagaimana

<sup>1</sup> Siapa yang Butuh Pilkada? 08 Apr 2005, <http://www.fajar.co.id/news.php>

masyarakat pemilih mampu meningkatkan peran serta menjatuhkan pilihannya sendiri kepada calon yang dinilai tepat tanpa ada tekanan - seperti mobilisasi partai politik ataupun tim sukses masing-masing calon. Kondisi yang demikian ini cukup ideal dan diyakini dapat memperkuat keberanian pemilih, bahkan mencerdaskan bangsa.

Proses ini menempatkan pilkada tidak hanya untuk mencapai tujuan pokok, tetapi bagaimana mencapai tujuan tersebut melalui proses pendidikan politik yang mendasar. Yaitu mendidik para pemilih untuk mampu menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan yang mempertimbangkan rasionalitas, tanpa intervensi siapa pun dan dalam bentuk apa pun.

Di Aceh keberadaan pemilih masih seperti kondisi di atas artinya adalah bahwa mereka masih merupakan obyek dari proses Pilkada dan bukan sebagai subyek artinya merekalah yang benar-benar menjadi penentu sebuah pilihan. Mobilisasi masyarakat oleh parta dan balon adalah sesuatu yang memang terjadi selama proses Pilkada ini. Dan hal ini dianggap menjadi sesuatu yang wajar. Jika melihat fenomena ini maka pada dasarnya kesadaran berdemokrasi dalam diri pemilih itu sebenarnya yang kurang.

Esensi demokrasi adalah keberadaan individu yang mampu memerankan dirinya dengan kemampuan menentukan pilihan secara rasional. Kondisi ini diawali dengan proses rumit pada diri pemilih. Sebelum menentukan pilihannya dia berpikir, sehingga timbul kecerdasan untuk menentukan pilihan yang tepat. Semua didasarkan pada rasionalitas, menyangkut program yang ditawarkan, kapabilitas calon serta parameter lainnya. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bangunan demokrasi yang baik dan sehat, sehingga mendapatkan calon yang benar-benar berkualitas.

Budaya demokrasi itu sendiri adalah serangkaian norma-norma demokrasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah titik tumpu menakar kemampuan rakyat untuk mempersiapkan diri dalam sebuah proses

politik dalam kerangka memerintah dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Sementara ini, sebagian besar pemilih dalam menentukan pilihannya masih melihat orang yang mengajak, siapa yang memobilisasi, dan orang yang pernah berjasa kepada pemilih. Di samping itu juga pertimbangan siapa yang dikenal pemilih, bahkan siapa yang bisa memberi sesuatu lebih besar.

Rasionalitas dalam proses berpikir sehingga menjadi keputusan politik untuk memilih calon tertentu belum bisa berlaku pada pemilih pada level akar rumput (*grass roots*).<sup>3</sup> Masyarakat Aceh dalam pelaksanaan pilkada ini juga masih ada yang mengalami hal seperti diatas. Mereka masih banyak yang mengedepankan emosi dalam menentukan pilihan. Pola pikir dan sikap seperti inilah yang kebanyakan masih akan menuansai pelaksanaan pilkada di Aceh untuk tahun ini maupun beberapa tahun ke depan. Kondisi ini terjadi karena pendidikan politik belum pernah menyentuh masyarakat pada level bawah atau level akar rumput.

Kedewasaan berfikir untuk berdemokrasi secara rasional memang merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilaksanakan. Batas antara keinginan pribadi dengan dorongan dari luar terhadap pilihan tertentu masih merupakan benang tipis yang kadang-kadang sulit untuk dibedakan.

Para pemilih di NAD dengan latar belakang sejarah konflik yang panjang dapat menjadi salah satu penghambat pelaksanaan demokrasi secara rasional. Konflik berkepanjangan tidak hanya berpengaruh secara fisik pada masyarakat juga berpengaruh terhadap kerangka berpikir dan bertindak dikalangan pemilih.

#### Yang Dipilih

Pilkada adalah sebuah cara yang diharapkan mampu mewujudkan sosok pimpinan daerah yang memang betul-betul menjadi pilihan rakyat. Yang menjadi

<sup>2</sup> Drs H Hendro Martojo MM, *Suara Merdeka*, Rabu, 12 Mei 2005.

<sup>3</sup> *Ibid*

pertanyaan sosok pimpinan seperti apa yang menjadi impian rakyat ?

Pada dasarnya seorang pemimpin adalah orang yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan dapat mengembangkan daerahnya menuju kemajuan. Sosok yang seperti itu harusnya adalah pertama, pemimpin yang mempunyai akuntabilitas publik, kedua, ia dipilih karena benar-benar dia sosok yang baik dan bukan hanya menjadi sebuah alat kepentingan partai maupun golongan, ketiga, ini harus dilakukan agar bisa tercipta mekanisme untuk mengembangkan kepemimpinan yang benar-benar bersifat bottom up atau kepemimpinan dari bawah. Keempat, ia diharapkan bisa meningkatkan kualitas partisipasi rakyat dalam pemilu dan juga kualitas keterwakilan elite politik.<sup>4</sup>

Kenyataan dilapangan memang sedikit berbeda dengan mekanisme yang ada. Sesuai dengan mekanisme adalah seharusnya rakyat dibebaskan untuk memilih tanpa ada paksaan, hasutan, dipengaruhi oleh pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol untuk menarik emosi massa agar demokrasi benar-benar murni dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan apakah salah apabila seorang "balon" memobilisasi, menggunakan tokoh panutan, menggunakan simbol-simbol penarik emosi massa pemilih, sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan calon atau dirinya? Menjawab pertanyaan ini tidaklah salah jika dilihat tujuan dari balon tersebut untuk meraih jumlah suara. Para balon memanfaatkan peluang, yakni proses berpikir tradisional dengan menggugah emosional pemilih guna meraih suara.

Pada dasarnya tujuan dari pilkada yang merupakan salah satu wahana pendidikan demokrasi bagi rakyat perlu dijalankan sesuai dengan esensinya. Pada akhirnya demokrasi bertujuan untuk memberikan pendidikan politik guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan

<sup>4</sup> Syamsuddin Haris, *Pilkada Langsung Timbulkan Banyak Masalah*, *Suara Merdeka*, Minggu 10 April 2005

meningkatkan daya saing dengan jalan balon juga harus mendukung terselenggaranya demokrasi yang seharusnya. Yang terjadi selama ini masih cenderung mengedepankan emosi, sehingga belum menjadi budaya politik yang cerdas dengan pilihan rasional dan mandiri.

Pilkada NAD yang baru saja berlangsung memberikan warna tersendiri dengan hadirnya 9 pasang cagub dan cawagub dari berbagai kalangan. Ada calon yang mewakili partai maupun dari unsur individu. Keamanan di Nad yang semakin kondusif pasca perjanjian damai Helsinki memberikan atmosfer baru bagi Pilkada perdana di NAD. Calon-calon yang muncul dari berbagai kalangan menunjukkan adanya derajat kesamaan bagi warga untuk menjadi orang-orang yang dipilih. Keberadaan calon dari perwakilan individu yang sebelumnya adalah juru runding GAM memberikan warna baru dan telah menjadi sebuah bukti bahwa perdamaian telah ada dan terus berjalan di bumi Serambi Mekkah.

Keragaman calon-calon ini semakin memberikan pelajaran berharga baik bagi kandidat maupun bagi pemilih untuk terus belajar berdemokrasi dengan aman dan damai.

#### Penutup

Pilkada adalah sebuah ruang kelas yang muridnya adalah para calon terpilih dan pemilih. Sebagai sebuah kelas jika ingin kelasnya aman perlu sebuah kerjasama dan pembelajaran yang sama serta persamaan persepsi yang sama. Para calon terpilih dan pemilih harus benar-benar faham tentang esensi dari demokrasi. Pelaksanaan Pilkada sebagai salah satu cara hidup berdemokrasi harus dapat memberikan pelajaran yang mampu mencerdaskan para calon yang dipilih maupun pemilih untuk bersikap rasional dalam menyelenggarakan Pilkada guna menghindari konflik yang pada umumnya muncul dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Munculnya konflik biasanya dipicu oleh ketidakpuasan salah satu pihak akan hasil yang telah dicapai. Konflik sering muncul karena demokrasi yang seharusnya

membuat para pelaku Pilkada berfikir rasional tidak tercapai dan hanya mengedepankan pola pikiran emosional.

Dalam esensi demokrasi, rakyat/pemilih menentukan pilihannya untuk memberikan mandat kepada kepala daerah untuk memimpin rakyat/pemilih itu sendiri. Dengan demikian, dukungan/pilihan terjadi dengan sadar dan rasional, sehingga terpilih yang terbaik dari para calon. Terbaik di sini adalah dari berbagai sisi, bukan satu sisi saja, misalnya karena kenal, karena uang, karena balas budi, atau sebab-sebab lain yang tidak substansial. Apalagi hanya karena diajak oleh tokoh panutannya, sehingga apabila tokoh panutannya berubah orientasi pilihan karena sebab tertentu, maka pemilih bisa bersikap masa bodoh, tidak peduli.

Kalau kita mau berpijak dari pengalaman sejarah, demokrasi bukanlah hal baru bagi bangsa kita, setiap daerah maupun suku bangsa mempunyai cara memilih wakilnya secara demokrasi. Kearifan yang dapat kita pelajari dari cara tradisional adalah tidak adanya gejolak ataupun konflik yang muncul dalam proses berdemokrasi. Aceh juga memiliki cara berdemokrasi dalam memilih pemimpin mereka, misalnya dalam pemilihan keuchik.

Titit Lestari, S.Si adalah Asisten Peneliti Madya pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Dan ingat, bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada ini akan menjadi sangat berpengaruh bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Karena ini akan menjadi barometer bagi dunia internasional sebagai kebijakan untuk penanaman modal. Jika Suhu polotik dan keamanan yang tidak menjamin maka investor luar negeripun enggan untuk berinvestasi di daerah kita.

Kepercayaan bangsa dan negara lain kepada kita akan menguat, kalau kita mampu melaksanakan dan menjalankan demokrasi dengan baik. Tolok ukur penyelenggaraan demokrasi tersebut adalah Pilkada itu. Jadi marilah kita bersama-sama meriahkan Pilkada secara aman dan damai. Apapun hasil dari Pilkada itulah memang pilihan kita dan dari sinilah kita belajar sedikit demi sedikit untuk lebih menerapkan demokrasi agar sesuai dengan esensinya.

## Menyongsong "Aceh Baru" (Beberapa Catatan Perjalanan Pilkada di NAD)

Oleh : Iri Dewanti

### Pendahuluan

Prediksi beberapa lapisan masyarakat yang mencemaskan akan rawannya kondisi keamanan menjelang dan pada saat Pilkada di NAD ternyata tidak benar. Hal ini terbukti bahwa akhirnya Pilkada berjalan lancar, tidak ada kendala dan halangan yang berarti. Aceh memang unik, dan fenomena yang diberikan cukup spektakuler. Bahkan jika setuju di tanah Iskandar Muda inilah para wartawan pemburu berita banyak yang seharusnya berterima kasih, berbagai berita paling akbar dihasilkan dari sini. Mulai dari konflik, Tsunami dan Pilkada paling demokratis.

Tidak dapat dipungkiri kondisi Aceh dari mulai masyarakat Indonesia lainnya dalam keadaan tidur nyenyak masyarakat di Aceh malah was-was dengan desingan peluru atau bunyian bom yang sewaktu-waktu bisa saja terdengar sangat dekat. Disaat masyarakat Indonesia lagi heboh dengan busung lapar. Masyarakat dunia lebih dihenyakkan dengan hampir seluruhnya masyarakat korban tsunami di Aceh terancam kelaparan karena kehilangan harta benda dan pekerjaan dihantam gelombang tsunami. Nah saat ini disaat daerah lain berkelahi sehubungan dengan Pilkada di daerahnya Aceh justru menunjukkan bahwa di sini ada damai. Berikut catatan bagaimana PILKADA di Aceh berlangsung dan apakah hasil PILKADA adalah metamorfosis bari kebangkitan Aceh?

### Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tentang Pilkada

Sebelum lebih lanjut kita membicarakan Pilkada maka terlebih dahulu kita melihat sekilas bagaimana sebenarnya

undang-undang pemerintahan Aceh Darussalam itu terbentuk dan akhirnya melahirkan undang-undang tentang Pilkada itu sendiri.

Prof. DR. Sri Soemantri, guru besar Universitas Padjajaran Bandung menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan amanat UUD 1945 yang mesti dilakukan secara demokratis. Menurutnya jika pemilihan kepala negara dilakukan dengan sistem presidensial yang dipilih rakyat, maka kepala daerah juga harus menganut sistem yang sama, bukan menganut sistem parlementer yang dipilih DPRD.<sup>1</sup> Pada hakekatnya dengan Pilkada secara langsung masyarakat akan lebih tahu karakter calon kepala daerah yang akan mereka pilih, selain itu masyarakat daerah juga akan lebih berani mengkritisi kepala daerah yang mereka pilih secara langsung, apabila melakukan tindakan di luar aturan yang bertentangan dengan konstitusi perundang-undangan yang berlaku.

Nota kesepahaman yang ditandatangani bersama antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki sebagai titik awal tentang disusunnya rancangan pemerintahan NAD secara menyeluruh baik dalam pelaksanaan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan tentang pelaksanaan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Undang-undang pemerintahan tentang pilkada di NAD tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung baru diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi NAD. Ketentuan tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung terdapat dalam pasal 12 sampai dengan pasal 16

<sup>1</sup> Kompas, 11 Agustus 2004

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Qanun Nomor 2 tahun 2004 yang dirubah dengan Qanun Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD. Pemilihan dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.<sup>3</sup>

#### PILKADA NAD

Penetapan jadwal pilkada merupakan kegiatan penting dalam penyelenggaraan pilkada. Semua kegiatan dalam penyelenggaraan pilkada disusun dan dilaksanakan berdasarkan jadwal pemungutan suara yang telah ditetapkan. Penetapan jadwal pilkada di Provinsi NAD telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 ditegaskan bahwa pilkadasung di Provinsi NAD dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan (pasal 16 ayat (1). UU ini diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001 sehingga seharusnya pilkada dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2006.<sup>4</sup>

Jadwal di atas kemudian dipercepat dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 226 ayat (3) UU ini ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung

<sup>2</sup> M. Jakfar, "Penyelenggaraan Pilkadasung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", makalah pada Seminar-Dialog Budaya Daerah 2005, (BKSNT Banda Aceh, 27 September 2005).

<sup>3</sup> Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2001.

<sup>4</sup> M. Jakfar, *Loc.cit.*

paling lambat pada bulan Mei 2005. Namun karena hal-hal teknis sehubungan dengan kondisi NAD yang masih dirundung musibah gempa bumi dan tsunami, setelah berkonsultasi dengan DPRD dan Gubernur Provinsi NAD, KIP menetapkan tanggal 25 Oktober 2005 sebagai hari pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 16 Bupati/Walikota di Provinsi NAD. Pembahasan terhadap draft revisi Qanun Nomor 2 Tahun 2004 membutuhkan waktu yang lama sehingga durasi waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan suara pada 25 Oktober 2005 tidak cukup. Oleh karenanya, KIP, DPRD dan Desk Pilkada melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas penundaan jadwal pilkada. Pada tanggal 12 Agustus 2005, disepakati bahwa jadwal pemungutan suara pada tanggal 29 Desember 2005.<sup>5</sup>

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2005 pemerintah dan pimpinan GAM menandatangani MoU Helsinki. Dalam MoU tersebut terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pilkada yaitu : Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya. Ketentuan di atas hanya mengatur bahwa pilkada di Provinsi NAD dilaksanakan Pada bulan April 2006 dan selanjutnya. Sedangkan penjabaran resmi dari Pemerintah tentang jadwal pilkada belum ada sehingga menimbulkan berbagai kemungkinan jadwal terjadinya pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD.<sup>6</sup>

Pelaksanaan kapan sebenarnya Pilkada NAD dapat berlangsung awalnya diperkirakan dengan berbagai kemungkinan yaitu a) Pilkada berlangsung pada April 2006 sesuai dengan MoU. Akan tetapi, terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Serambi Indonesia*, September 2005

persyaratan, antara lain pemerintah harus menyelesaikan

Undang-undang Pemerintahan Aceh pada November atau Desember 2005, lalu undang-undang bukan dalam bentuk qanun, tapi cukup dalam bentuk keputusan KIP. Jika penjabaran undang-undang pun dalam bentuk Keputusan KIP, seperti undang-undang pemilihan legislatif dan Pilpres yang lalu, maka waktu persiapan cukup lima bulan. Artinya, April 2006 bisa berlangsung Pilkada sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman. Selain itu, undang-undang yang dibuat itu harus lebih rinci, sehingga KIP hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis, yang tak melahirkan norma baru, sehingga tak membutuhkan waktu lama dan perdebatan panjang.

Selanjutnya jadwal pilkada direncanakan pada Agustus 2006. Apabila undang-undang tersebut disahkan pada akhir Maret 2006 sebagaimana batasan dalam MoU dan penjabarannya dalam bentuk Peraturan KIP, bukan qanun maka Agustus 2006 Pilkada bisa berlangsung, hari pemungutan suaranya. Ketiga Jadwal pilkada adalah Maret 2007. Apabila pemerintah berhasil mengundangkan UU Pemerintahan Aceh pada akhir Maret 2006 dan aturan pelaksanaannya melalui qanun yang akan dibuat oleh DPRD yang membutuhkan waktu enam bulan dan persiapan pilkada oleh KIP membutuhkan waktu sekitar lima bulan, maka pada Maret 2007 Pilkada baru bisa dilaksanakan. Selain itu, dalam MoU Helsinki juga ditegaskan bahwa dalam waktu 1 tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan MoU ini, pemerintah akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR.<sup>7</sup>

Namun akhirnya Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh akhirnya disahkan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di NAD dilakukan

<sup>7</sup> Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka* Butir 1.2.1. hlm. 10.

sesuai dengan Undang-Undang yaitu melalui tahap a) pendaftaran dan penetapan daftar pemilih b) Pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. c) Kampanye, d) Pemungutan suara e) Penghitungan suara f) penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota terpilih, pengesahan dan pelantikan.<sup>8</sup>

Pilkada NAD berbeda jauh dari Pilkada sebelumnya yang dikuasai anggota DPRD. Sebagai kelanjutan dari proses perdamaian RI-GAM, dalam pilkada 2006 diperkenalkan beberapa model yang sebelumnya tidak dikenal. Pilkada ini mengizinkan pencalonan kepala daerah melalui jalur independent, menguji kemampuan baca Al-quran kandidat, suara yang diberikan langsung oleh rakyat serta keterlibatan tim pemantau internasional dalam pelaksanaan Pilkada.

Calon pemimpin baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga termasuk paling banyak. Untuk tingkat Calon Gubernur saja ada 9 pasangan yang maju ke pentas pemilihan baik yang diusung oleh partai politik maupun dari independent. Sementara di kabupaten-kota di NAD yang jumlahnya 21 masing masing ada yang memiliki 4 hingga 8 calon Bupati atau walikota. Pentas Pilkada di NAD memang cukup seru berbagai spekulasi dilancarkan baik oleh praktisi, politisi hingga tingkat pedagang di pasar tradisional, maupun pengangguran di warung kopi.

Jauh sebelum start kampanye dimulai banyak calon yang sudah (tanpa bermaksud kampanye pemilihan Gubernur) namun telah bermunculan di media cetak maupun elektronik. Masing-masing menyuarakan kepentingan masyarakat. Berusaha tampil *low profile* seperti turun ke sawah atau kebun masyarakat, memberikan bantuan hingga tak henti-hentinya

<sup>8</sup> *Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Pasal 66 ayat 4, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2006), htm. 50.

memberikan ucapan selamat berbuka puasa, selamat hari Raya dan lain-lain.

Pada tanggal 11 Desember 2006 digelarlah pesta demokrasi paling akbar di NAD. Masyarakat sendiri ada yang antusias memberikan hak suara tapi tidak dipungkiri banyak juga yang apatis. Masyarakat memiliki harapan akan perubahan, tetapi masyarakat juga cemas menenti ke arah mana perubahan yang akan dibawa oleh pemimpinnya. Tetapi pada akhirnya dari sembilan calon Gubernur/wakil Gubernur Irwandi dan Nazar adalah pasangan yang diharapkan oleh rakyat akan membawa perubahan, dan ini adalah fair, demokratis tidak seorangpun bisa menghambatnya karena ini kehendak rakyat Aceh.

#### "Aceh Baru" Semangat Baru

Pilkada Aceh berjalan lancar, tidak ada halangan yang berarti. Sekalipun pada awalnya banyak prediksi tentang rawannya masa Pilkada di NAD. Ternyata hasil Pilkada yang hingga tulisan ini selesai Irwandi dan Nazar masih memimpin dalam perolehan suara terbanyak suasana tetap aman terkendali.

Selama masa kampanye berbagai pesan disampaikan berbagai janji tentang kebaikan diucapkan yang semuanya ditujukan untuk masyarakat agar berkesan dan mau memilihnya pada saat pencoblosan. Intinya Aceh memang harus mempunyai figur pemimpin yang dicintai rakyat, pengayom masyarakat dan bebas dari KKN yang selama ini dibenci oleh masyarakat tapi sangat sulit untuk terlepas darinya.

Selama kampanye semua kandidat sepakat untuk terlepas dari KKN. Damai, bersih dan sejahtera adalah tiga elemen dasar yang akan memperjelas ada atau tidaknya perubahan dan perbaikan di Aceh pasca pilkada.

Aceh yang damai adalah prasyarat untuk mewujudkan Aceh yang bersih dan sejahtera. Aceh yang sejahtera akan sulit diwujudkan tanpa adanya mentalitas yang bersih dari segenap aparatur pemerintah yang dapat dijadikan teladan oleh pihak lain. Aceh akan benar-benar sejahtera jika terlepas dari

unsur-unsur KKN. Jika pemimpin daerah yang terpilih benar-benar menerapkan kinerja pemerintahan atas dasar kemampuan, berjalan dalam koridor undang-undang dan peraturan daerah bukan atas dasar teman-teman yang mengantarkan kesuksesannya menjadi pemimpin (kepala daerah), kerabat dan "senang tidak senang", niscaya Aceh Baru akan terwujud.

Hasil Pilkada setidaknya telah terlihat hasilnya siapapun yang terpilih itu adalah suara rakyat Markas Besar PBB di New York Sekjen PBB menyambut baik telah berlangsungnya hasil Pilkada maupun kesepakatan damai yang ditandatangani GAM dan Pemerintah Indonesia. Semua komponen harus menghormati hasil Pilkada. Hal ini semata untuk memajukan proses damai yang ditujukan untuk membangun Aceh yang aman dan sejahtera di dalam kerangka Indonesia yang bersatu dan demokratis. Yang paling penting lagi pemenang Pilkada ini juga harus mensyukuri dan iktiar bahwa melakukan amanat rakyat bukan hal yang mudah tanggung jawab bukan semata kepada manusia yang hidup tetapi kepada Allah sang pencipta karena bagaimana janji yang diucapkan pada masa kampanyenya adalah ikrar antar manusia dengan sang pencipta.

Bagi Kepala Daerah yang telah memenangkan Pilkada, penggalangan kerja sama antar berbagai pihak baik sipil maupun militer serta komponen masyarakat sipil mantan anggota GAM perlu dilakukan dalam mengambil berbagai kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya yang menyangkut masalah ekonomi dan kehidupan sosial. Kedamaian dan ketenteraman adalah kunci utama untuk melakukan pembangunan. Pertikaian dan konflik laten harus benar-benar ditiadakan. Riak-riak kecil dalam pemerintahan diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Jangan terlalu menganggap sepele berbagai hal yang menyangkut ketidakadilan bagaimanapun rakyat bosan dengan ketertindasan dan ketidakadilan. Sebaliknya masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap pilihannya, jangan terlalu

#### Penutup

Tulisan ini selain berbagai catatan yang bertujuan sebagai sumbangan untuk sumber literasi juga penulis sama halnya dengan masyarakat lainnya berharap Aceh damai, tenteram adil, makmur dan sentosa menjadi bagian yang abadi di bumi serambi mekah ini.

Damailah Aceh dengan pemimpin baru, suasana baru tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, karena dua hal ini yang paling utama membuat masyarakat punya motivasi untuk maju dan bekerja keras. Pemimpin yang arif tentu akan memberikan ketenangan pada rakyatnya. Semoga Harapan pembaca juga sama.

memaksakan kehendaknya untuk melakukan tuntutan. Berbagai keinginan masyarakat tentu harus diwujudkan tetapi tentu saja dengan mekanisme yang berlaku, baik itu melalui prosedur undang-undang dan peraturan pemerintah juga dengan kerangka kebijakan yang tidak mendorong pemerintah daerah kepada hipokrit dan inskonstitusi.

Masyarakat telah menentukan pilihannya maka dukunglah pemerintahan baru untuk kepentingan kemajuan Aceh, ketenteraman, keadilan, kesejahteraan dalam naungan NKRI.

---

Irini Dewi Wanti, S.S. adalah Peneliti Muda pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Dibalik Kemenangan GAM

Oleh : Iskandar Eko Priyotomo

### Pendahuluan

Penandatanganan MoU perdamaian antara Pemerintah R.I dengan GAM sangat disyukuri oleh semua pihak, tidak hanya masyarakat Aceh tetapi juga bangsa Indonesia yang menginginkan penyelesaian damai bagi konflik berkepanjangan di Aceh.

Salah satu implikasi dari perjanjian damai tersebut adalah diperbolehkannya rakyat Aceh mengadakan calon independent untuk pemilihan langsung dan membuat partai lokal/independen. Hal ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi rakyat dalam membangun dan menata pemerintahannya sendiri yang memihak pada rakyat Aceh. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sedangkan bagi pemerintah pusat Pilkada di Aceh merupakan ajang pembuktian keseriusan pemerintah dalam membangun Aceh yang damai, dimana selama ini banyak anggota masyarakat Aceh yang meragukan akan keseriusan pemerintah pusat. Selain itu juga penyelenggaraan Pilkada menjadi sebuah prestise bagi seluruh bangsa Indonesia dan pemerintahan SBY-Kalla. Perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM menjadi suatu contoh konkrit bagi penyelesaian konflik secara damai di seluruh belahan dunia.

Sebagai bagian dari proses perjanjian damai adalah penyelenggaraan pilkada tentunya mengarahkan mata masyarakat dunia ke Aceh untuk melihat, mengawasi, dan mempelajari penyelenggaraan Pilkada.

Dengan dibukanya kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk mencalonkan diri mengikuti Pilkada melalui jalur Independen tentunya menjadi peluang bagi GAM untuk memimpin pemerintahan di Aceh secara damai sesuai dengan Mou. Maka tidak mengherankan walaupun secara kelembagaan GAM tidak mengikuti Pilkada, namun tokoh-tokoh GAM baik di tingkat

pusat seperti Irwandi Yusuf (wakil GAM di *Aceh Monitoring Mission /AMM*) - M. Nazar (ketua presidium SIRA /kelompok yang memperjuangkan referendum bagi Aceh), Hasbi Abdullah, maupun tokoh-tokoh GAM di daerah seperti, Munawarliza Zain/Islamuddin ST (calon walikota/wakil walikota Sabang), Ilyas Hamid/Syarifuddin (Cabup/Cawabup Aceh Utara), Sulaiman-Muslim ( calon bupati/wakil bupati Aceh timur), Mirza (Calon Bupati Pidie), Lingga Kinsyah (calon Bupati Aceh Tenggara), Fauzan Azima (calon Bupati Bener Meriah), Ramli ( Calon Bupati Aceh Barat), M.Azhar (calon Bupati Abdy), Teuku Suhaidi Yahya (calon Walikota Lhokseumawe), Ir Rusman (calon Bupati Aceh Tamiang), Asmadi Syam ( calon Bupati Nagan Raya) dan Taufik Afdal ( calon walikota Banda Aceh) beramai-ramai mengikuti Pilkada Aceh.

Keikutsertaan tokoh-tokoh GAM dalam Pilkada Aceh, kurang diperhitungkan oleh para pesaing mereka maupun para pengamat. Mereka dianggap tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan apalagi sebagian besar peserta Pilkada Aceh dari unsur GAM merupakan mantan kombatan yang selama ini berada di gunung dan hutan-hutan. Selain itu juga para pesaing maupun pengamat menganggap para tokoh GAM tidak memiliki mesin politik seperti yang dimiliki oleh para pesaingnya terutama yang berasal dari partai. Namun dalam kenyataannya ketika dilaksanakan penghitungan suara, banyak tokoh GAM memenangi pemilihan diberbagai daerah di Aceh termasuk pasangan Irwandi Yusuf- M. Nazar sebagai Gubernur/wakil Gubernur Aceh. Hal ini tentunya menjadi kejutan bagi semua pihak dan merupakan tamparan yang cukup keras bagi partai politik yang ada di Aceh. Terlepas dari persoalan ideologi GAM (yang mudah-mudahan sudah tidak memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI) ,kemenangan para tokoh GAM menimbulkan

Haba No. 41/2006

pertanyaan besar dari berbagai kalangan, baik para politisi sendiri maupun para pengamat politik.

Sosok pemilih yang ideal yang sekaligus menjadi asumsi penyokong legitimasi sistem pemilihan demokratis adalah seorang warga negara yang memiliki kemampuan untuk mengetahui konsekuensi dari pilihannya; sehingga ketika seluruh pilihan rasional individu ini dikumpulkan, kita akan mengetahui kehendak rakyat. Karenanya demokrasi sering dianggap superior terhadap sistem yang berdasarkan keniscayaan sejarah (komunisme) atau hak absolut (kerajaan atau teokrasi) karena demokrasi dapat dikonfirmasi secara empiris melalui pemilihan umum. Namun dalam kenyataannya pemilih di Indonesia merupakan pemilih apolitis / pemilih mengambang dalam artian sebgai pemilih di Indonesia bukanlah anggota partai atau organisasi yang diharuskan untuk memilih dan telah memiliki calon yang dipuja-puja. Para pemilih apolitis ini menganggap bahwa pemilihan bukanlah aktivitas politis yang memerlukan pemikiran yang mendalam melainkan sebagai sebuah peristiwa sosial biasa. Menurut sebuah teori pemilu dikatakan bahwa pilihan pemilih dijatuhkan hanya berdasar slogan, berita sensasional, salah informasi, kecenderungan pribadi, dan perasaan. Meskipun mereka berpikir secara politis dan berasumsi telah menganalisa posisi masing-masing kandidat, mereka tetap awam secara politik. Mereka tidak mengerti arti dan konsekuensi dari program yang ditawarkan para kandidat. Mereka tidak bisa menghubungkan posisi kandidat dengan kebijakan. Dilihat dari teori ini maka hasil pemilu tidak lebih dari proses acak.

Teori lain menyatakan pilihan ditentukan oleh opini elit. Disini juga posisi terhadap isu dan kebijakan calon tidak penting. Dalam teori ini pertarungan politik adalah pertarungan antar elit. Demokrasi menjadi oligarki dengan wajah populis.

Noelle-Neumann mengatakan bahwa meskipun memilih adalah aktivitas privat yang dilakukan sendirian di dalam bilik suara. Pilihan tidak dilakukan secara

Haba No. 41/2006

rasional dimana yang menentukan adalah hitungan untung-rugi bagi si pemilih. Absennya rasionalitas tidak hanya disebabkan oleh kekurangan intelegensia atau minimnya pendidikan, tetapi lebih karena tidak adanya ketertarikan serius terhadap politik. Pemilih bukanlah kalkulator rasional yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya. Tapi mereka pun tidak memilih secara asal-asalan. Manusia mungkin bukan makhluk politik, tapi ia adalah makhluk sosial. Lontaran ide dari kandidat atau komentator politik hanya akan diterima seseorang jika cocok dengan pendapat lingkaran sosialnya.

Dari berbagai analisa yang dikemukakan oleh para pengamat maupun para politisi terlihat ada beberapa penyebab mengapa para tokoh GAM memenangi Pilkada diberbagai daerah di Aceh, yaitu ; Adanya kesamaan pandangan antara GAM dengan pemilih. Adanya keinginan dari masyarakat untuk suatu perubahan, dan kedekatan kultural antara GAM dengan pemilih.

### Kesamaan Pandangan

Berpuluh tahun Aceh dilanda konflik bersenjata yang berkepanjangan. Perasaan sedih, dendam, takut, pasrah berkecamuk didalam benak setiap orang yang ada di Aceh baik korban langsung maupun tidak langsung. Dalam setiap doa mereka selalu berharap lingkaran setan konflik di Aceh dapat berkesudahan dan pada akhirnya doa mereka dapat dikabulkan melalui penandatanganan perjanjian Mou di Helsinki.

Dengan adanya perjanjian tersebut, rakyat Aceh dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan damai tanpa sedikitpun merasa khawatir.

Perasaan ketidaksenangan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat akibat kesalahan dalam mengambil kebijaksanaan penyelesaian konflik di Aceh tidak dapat begitu saja hilang dari ingatan rakyat Aceh. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Aceh selama ini ternyata tidak bisa dihapus begitu saja oleh kebijaksanaan yang

mengedepankan kekuatan militer. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di daerah konflik seperti Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, rasa ketidaksukaan pada pemerintah dapat dikatakan telah menebal dan diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan Pilkada Aceh membuka kesempatan terbuka bagi rakyat Aceh dalam menentukan nasibnya sendiri tanpa di hantui rasa ketakutan. Mereka memilih para kandidat yang dianggap dapat mewakili mereka dan menyerap aspirasi rakyat guna membangun Aceh secara damai dan bermartabat.

Selama ini rakyat Aceh merasa putus asa dengan sikap para pemimpin daerah yang tidak pernah mendengarkan mereka sehingga timbul pemikiran bahwa rakyat sengaja dibiarkan menderita.

Adanya beberapa tokoh GAM yang ikut dalam Pilkada Aceh menjadi angin segar bagi rakyat yang merasa aspirasinya selama ini tersumbat. Menurut mereka para tokoh GAM tersebut dapat mewujudkan keinginan rakyat untuk hidup makmur. Mereka melihat bahwa selama ini hanya GAM yang berani melawan kesewenang-wenangan pemerintah pusat (diluar cita-citanya yang ingin memisahkan diri dari NKRI) dibanding tokoh masyarakat lainnya. Maka tidak mengherankan jika dalam Pilkada Aceh kali ini para tokoh GAM mendapat dukungan diberbagai daerah terutama daerah-daerah konflik misalnya Aceh Timur, Utara dan Pidie.

### Perubahan

Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada saat pemilihan langsung Presiden, tahun 2004. Pemilih di Aceh sebagaimana pemilih didaerah lain di Indonesia banyak yang termasuk kedalam pemilih apolitis/mengambang, mereka tidak memahami berbagai program dan selogan yang dilontarkan para kandidat selama kampanye. Namun bukan berarti mereka milih secara acak, mereka memilih berdasarkan faktor-faktor psikologis,

diantaranya keinginan untuk mendapatkan suatu perubahan.

Faktor keinginan untuk mendapat perubahan di setiap pergantian kekuasaan merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi di Indonesia. Menurut Fachry Ali, kemenangan GAM dalam Pilkada di Aceh merupakan suatu Mitologi sesaat sebagaimana yang terjadi ketika Megawati mampu memimpin partainya menjadi pemenang pemilu. Masyarakat saat itu berharap Megawati dapat menjadi "Ratu Adil". Demikian pula ketika SBY-JK memenangkan pemilu 2004, banyak pemilih pada saat itu melihat pasangan SBY-JK dapat membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Megawati. Dengan demikian kemenangan GAM dapat dikatakan sebagai hasil dari pilihan naluri emosional masyarakat Aceh.<sup>1</sup>

Keinginan masyarakat Aceh untuk mendapat suatu perubahan terjadi karena mereka tidak percaya lagi dengan para pemimpin daerah yang dianggap tidak dapat mensejahterakan rakyat. Para pemilih di Aceh sudah lelah terhadap pemimpin-pemimpin Aceh yang hanya berani berjanji disaat kampanye, namun minim realisasi di lapangan. Sejak Aceh diselubungi kemelut konflik bersenjata, tidak ada satupun kebijakan dari pemimpin daerah yang mampu menyelesaikan persoalan Aceh sampai ke akar-akarnya. Mulai dari persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi, pelanggaran HAM, pengelolaan sumber daya alam, reintegrasi GAM, sampai dengan persoalan-persoalan pasca Tsunami.

Ketidaksukaan masyarakat berimbas pada para kandidat yang ikut dalam pilkada Aceh yang notabene banyak diikuti oleh para mantan pejabat. Banyak dari kandidat tersebut memiliki catatan yang buruk di mata pemilih. Oleh sebab itu pemilih mengalihkan pilihannya pada kandidat muka baru yang menurut mereka belum tercemar dari ketidakpedulian pada rakyat yang kebetulan

<sup>1</sup> Gatra, Mekar Bunga demokrasi Aceh. Gatra edisi No. 05 Tahun XIII

berasal dari kelompok GAM. Para pemilih di Aceh banyak yang memilih muka-muka baru tersebut tanpa memandang asal muasal kandidat tersebut. Bagi mereka yang terpenting adalah adanya perubahan yang dapat memperbaiki nasib mereka.

### Kedekatan Kultural

Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam berhubungan dengan orang lain, mereka akan sangat nyaman jika orang tersebut memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan darah, keturunan, asal tempat tinggal, agama, maupun budaya.

Demikian juga ketika seorang pemilih dalam pemilihan kepala daerah, maka pemilih tersebut akan memilih kandidat yang memiliki kesamaan dengan pemilih, baik itu ideologi, pandangan, dan bahkan kesamaan kultural.

Bagi masyarakat Aceh yang dikenal sangat kuat dalam memegang adat, mereka akan memilih kandidat yang banyak atau mendekati persamaannya dengan diri mereka. Hal ini terjadi ketika dalam pemilihan langsung Presiden R.I tahun 2004. Mereka banyak yang tidak mengenal kandidat presiden. Dari 4 kandidat presiden pada saat itu, nama Amin Rais lebih mendekati kedekatan kultural karena nama tersebut kental bernafas Islam sebagaimana nama-nama orang Aceh. Maka tidak mengherankan Amin Rais unggul di Aceh.

Demikian pula yang terjadi pada pilkada Aceh kali ini. Mereka memilih kandidat dari GAM yang dalam penampilannya, baik pada saat kampanye, brosur, selebaran, baliho, maupun foto dalam surat pemilih selalu menggunakan atribut kedaerahan.

Penggunaan atribut kedaerahan yang dilakukan GAM selama proses Pilkada diakui sangat efektif. Bahkan menurut Soemarsono, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, dikatakan bahwa salah satu kunci dari kemenangan pasangan independen calon Gubernur asal Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu pasangan Irwandi Yusuf

dengan Muhammad Nazar adalah busana adat Aceh yang dikenakan mereka saat berkampanye maupun saat dimuat dalam foto di kartu pemilih dan poster-poster lainnya. "Dari delapan pasangan calon Gubernur Provinsi NAD, tidak ada yang tampil dengan busana adat Aceh seperti Irwandi dan Muhammad Nazar. Mereka lainnya menggunakan busana formal. Padahal, di kalangan masyarakat Aceh, mereka masih sangat memegang adat istiadat. Maka keberuntungan ada pada "Irwandi Yusuf," ujar Soemarsono.<sup>2</sup>

### Penutup

Hasil pemilihan umum seringkali dianggap sebagai kehendak rakyat. Oleh sebab itu demokrasi sering dianggap superior terhadap sistem yang berdasarkan keniscayaan sejarah (komunisme) atau hak absolut (kerajaan atau teokrasi) karena demokrasi dapat dikonfirmasi secara empiris melalui pemilihan umum. Namun dalam kenyataannya pemilihan umum tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini terjadi karena banyak pemilih tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program-program yang ditawarkan oleh para kandidat. Bahkan tidak sedikit pemilih yang memilih kandidat berdasarkan kedekatan, baik pandangan, sosial, maupun kultural.

Demikian pula yang terjadi pada pilkada Aceh kali ini, kemenangan GAM tidak sepenuhnya merupakan kehendak rakyat. Bahkan hal ini bisa jadi merupakan sebuah keinginan sesaat dari rakyat Aceh. Apabila hal ini yang terjadi tentunya merupakan tugas yang sangat berat dari GAM dalam memimpin rakyat Aceh menuju kedamaian dan kemakmuran.

Rakyat memiliki pengharapan yang cukup tinggi terhadap kinerja GAM dalam memimpin Aceh. Bahkan tidak sedikit rakyat yang menganggap GAM dapat merubah nasib mereka semudah membalikkan tangan. Apabila pengharapan tersebut tidak terpenuhi, maka hal ini menjadi bumerang

<sup>2</sup> Kompas, Pakaian Adat Aceh Salah Satu Kunci Kemenangan GAM, 13-12-2006

bagi GAM dikemudian hari. Untuk dapat memenuhi pengharapan rakyat GAM perlu melakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik dengan pemerintah pusat, legislatif daerah, birokrat, dan rakyat sendiri.

Semua pihak harus memiliki persepsi yang sama yakni membangun Aceh demi kehidupan rakyat.

---

Iskandar EP, SS. adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

## Suara Ulama dalam Pilkada Aceh

Oleh : Agus Budi Wibowo

### Pendahuluan

Masuknya Islam ke Aceh pada abad ketujuh atau kedelapan Masehi banyak sekali mempengaruhi adat-istiadat Aceh. Bahkan pengaruh Islam itu sangat besar, sehingga ada pepatah yang menyebutkan *hukom ngon adat lagee zat ngon sipheuet* (hukum (syariat/hukum Islam dengan adat bagaikan benda dengan sifatnya). Selain itu, masyarakat Aceh diakui sangat religius. Ajaran agama Islam merasuk ke dalam sosio kultural dan adat-istiadat masyarakatnya. Bagi masyarakat di daerah ini segala sikap dan pandangannya dan segala macam bentuk benar-salah, bagus-jelek, baik-buruk dan segala macam bentuk penilaian selalu dikaitkan dengan ajaran agama Islam.

Dalam konteks ini ulama mempunyai peran yang cukup penting sehingga terbentuk masyarakat Aceh yang seperti tampak kita lihat pada saat ini. Masyarakat Aceh yang memegang nilai-nilai keislaman. Tulisan ini ingin membahas keberadaan ulama dalam masyarakat Aceh dan kemanakah suara ulama dalam pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung) 2006? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan mengedepankan peranan ulama<sup>1</sup> dalam sosio politik kemasyarakatan

<sup>1</sup> Menurut Ismuha, ulama berasal dari bahasa Arab, jama' (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmiawan. Di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya perkataan ulama hanya digunakan untuk para ahli agama Islam saja. Lihat Ismuha, "Ulama dalam Perspektif Sejarah", dalam *Agama dan Perubahan Sosial*. Taufik Abdullah (ed.). (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983). hlm. 3. Sementara menurut Rusdi Sufi (1997: 5) mengatakan bahwa ulama adalah aparat pendamping dan penasehat umara atau pemimpin adat dalam melaksanakan pemerintahan khususnya dalam memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bidang hukum. Dengan kata lain ulamalah yang membantu atau memberi nasihat kepada sultan, panglima sagoe, ulebalang dan sebagainya dalam

terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada tanggal 11 Desember 2006.

### Posisi dan Peran Ulama Aceh

Dalam lintasan sejarah masyarakat Aceh, dari periode proses Islamisasi awal hingga saat ini ulama memegang posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Ulama menjadi status dengan wewenang yang significant dan adakalanya posisi ini lebih dipatuhi oleh masyarakat dibandingkan kepada pemimpin lainnya. Menarik bahwa walaupun ulama sering diposisikan sebagai pemimpin informal, tetapi pada dataran realitas historis Aceh, tanpa bantuan sosok ulama, maka pemimpin formal menjadi tidak berarti.<sup>2</sup> Dengan demikian, posisi ulama di dalam sistem kemasyarakatan dan pemerintahan sepanjang sejarah Aceh cukup dominan.

Peran ini mencapai posisi yang mantap pada masa pemerintahan dipegang oleh Sultan Iskandar Muda. Menurut kronika-kronika Aceh, pembagian ketatanegaraan Aceh dalam bentuk *mukim* terjadi pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Sebagai seorang raja Islam, baik sebagai kepala urusan keduniawian maupun kerohanian, cepat-cepat ia menyadari bahwa Kerajaan Aceh sebagai negara Islam dapat diandalkan hanya dengan mempererat hubungan organisasi

berbagai hal yang berkenaan dengan masalah keagamaan dalam wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, ulama ini dalam struktur pemerintahan tradisional di Aceh dikenal dengan pemimpin agama. Lihat Rusdi Sufi, "Ulama dan Umara dalam Perspektif Sejarah di Aceh", *Haba* No. 5/1997. (Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh, 1997).

<sup>2</sup> Aslam Nur, "Peranan Ulama dalam Merevitalisasi Kesadaran Berbangsa (Refleksi Historis Antropologis)". Makalah dalam Sarasehan Guru Bidang Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial/Budaya yang diselenggarakan BKSNT Banda Aceh 22-23 November 2006 di Aceh Besar

kerajaan. Apabila pada masa itu *gampong* atau kampung merupakan satu kesatuan masyarakat dalam susunan ketatanegaraan yang diperintah langsung oleh seorang ketua yang dinamakan *keuchiek*, maka Sultan Iskandar Muda menetapkan bahwa tempat-tempat atau kampung yang penduduknya melakukan sembahyang Jum'at dalam mesjid yang sama merupakan daerah yang disebut *mukim*.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di seluruh Kerajaan Aceh terdapat hanya 7 buah mesjid yaitu mesjid Baiturrahim terletak di Kutaraja (=dalam), mesjid Baiturrahman yang menjadi sangat terkenal pada ekspedisi kedua, mesjid Indrapuri dalam XXII *mukim*, mesjid Indrapurwa di Kuala Neujid atau Pancu dalam VI *mukim sagi* XXV, dan ketiga mesjid di Ladong, Cadek, dan Krueng Raya dalam XXVI *mukim*.<sup>3</sup>

Lama kelamaan setelah Islam semakin mengakar di dalam masyarakat para imam yang tadinya mengimami shalat Jum'at di mesjid-mesjid itu berhasil pula melaksanakan kekuasaan-kekuasaan keduniawian terhadap penduduk kampung-kampung yang bershalat Jum'at di mesjid-mesjid yang sama. Lambat-laun para imam ini menyerahkan urusan-urusan kerohanian di dalam daerah mereka kepada orang lain supaya mereka lebih mantap dapat mengurus pemerintahan.

Oleh karena itu, ketua yang memerintah suatu *mukim* kadangkala dinamakan *imeum mukim* atau *imeum adat* untuk membedakan antara *imeum seumayang* di dalam mesjid. Dengan demikian, kesatuan masyarakat asli yaitu *gampong* melebur dalam kesatuan ketatanegaraan, yaitu *mukim* dan akibatnya para kepala *gampong/kampung* atau *keuchiek* menjadi bawahan *imeum mukim*.

Semakin banyak penduduk dan meluasnya daerah kampung, maka dengan sendirinya di antara beberapa anggota yang mengurus kepentingan keluarga dan umum merasakan perlunya mereka lebih bersatu

dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, yaitu sembahyang lima waktu, melaksanakan pendidikan agama dan sebagainya dalam tempat beribadat yang dinamakan *binasah* atau *meunasah* dan terjadilah pembagian kampung dalam *meunasah-meunasah*. Ketua *meunasah* dinamakan *teungku meunasah*. Ia pun turut dalam mempertahankan kepentingan jama'ahnya di bidang keduniawian sehingga ia menjadi wakil kepala kampung. Oleh karena itu, dewasa ini kesatuan rakyat terkecil adalah *meunasah*.<sup>4</sup>

Dalam tataran lebih tinggi, ulama merupakan penasihat sultan. Ia berada pada posisi yang cukup setara dengan jabatan di kalangan pemerintahan. Dapat disebutkan di antaranya, Abdul Rauf As-Singkili merupakan ulama kerajaan yang membuat kanun dan hukum pemerintahan. Ia menduduki jabatan sebagai Qadli Malikul Adil. Sebelumnya, terdapat pula dua ulama besaar lain di Aceh yang cukup mempunyai pengaruh, yaitu Syech Nuruddin Ar-Raniry dan Syech Hamzah Fansuri.

Tatkala Belanda melakukan agresi terhadap kedaulatan Aceh, ulama berada di garis depan pertempuran. Ulama menjadi panglima perang. Beberapa diantaranya dapat disebutkan Teungku Chik Di Tiro. Dayah menjadi tempat menyusun strategi. Bahkan sebagian dayah menjadi semacam lembaga pemberi "ijazah" atau legitimasi bagi para panglima dan prajurit sebelum terjun ke medan peperangan.<sup>5</sup>

Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola hubungan antara ulama di satu sisi dengan masyarakat di sisi lainnya. Jika sebelumnya hubungan kedua belah pihak tidak dalam bentuk "pemimpin dan

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dayah seperti ini biasanya dinamakan Zauyah. Salah satu di antaranya adalah zauyah Tanoh Abe Aceh Besar. Tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajah di antaranya adalah Tgk. H. Syech Abdul Wahab yang merupakan pejuang pada zaman kemerdekaan. Tokoh lainnya adalah Tgk. Chiek Tanoh Abee yang menjadi penasihat Perang Atjeh. Lihat Ahmad Arif. "Demokratisasi Menanti Suara Ulama Dayah Aceh...", *Kompas* tanggal 1 Desember 2006.

yang dipimpin", namun akibat imperialisme barat, hubungan keduanya berubah menjadi hubungan yang bermuatan kepemimpinan vertikal struktural. Walaupun sultan dan *uleebalang* masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, namun kepemimpinan ulama menjadi lebih dominan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pasca kemerdekaan, sejalan dengan dinamika yang terjadi pada masyarakat Aceh, hubungan kepemimpinan antara masyarakat dengan ulama juga mengalami pergeseran dan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ulama sebagai "suara ulama adalah suara masyarakat".

Ulama tidak lagi dipandang sebagai pemimpin dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika sebelumnya ketergantungan masyarakat terhadap ulama untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan demikian besar, maka kini masyarakat akan mendapatkan informasi dari berbagai jalur, tidak saja dari ulama. Dari perspektif ini, secara perlahan-lahan hubungan akrab antara masyarakat dengan ulama merenggang.<sup>7</sup>

#### Suara Ulama dalam Pilkada

Pasca kemerdekaan, Indonesia telah melakukan beberapa kali pemilihan umum (Pemilu). Dalam setiap pemilu ulama Aceh ternyata ikut terlibat dan berkiprah di dalamnya. Sebelum Pemilu tahun 1987 sebagian besar ulama Aceh memberikan dukungan penuh terhadap Partai Persatuan Pembangunan (P3) sehingga pada setiap Pemilu partai ini selalu menang di Aceh.

Namun menjelang Pemilu tahun 1987 berbagai upaya dilakukan untuk memikat ulama agar bersedia mendukung dan masuk ke dalam Partai Golkar. Akibatnya, sebagian ulama menerjunkan diri dalam bidang politik dengan memberikan dukungan terhadap Golkar, baik sebagai

<sup>6</sup> Aslam Nur, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

pembicara di kampanye Golkar maupun "bermesraan" dengan pengurus partai tersebut. Akhirnya Golkar yang didukung sebagian ulama ini mulai menunjukkan kemampuannya sebagai partai yang menghimpun massa begitu besar.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkadasung) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 dukung mendukung dalam bentuk pernyataan dan suara menjadi santapan sehari-hari. Pernyataan dukungan tersebut dapat berasal dari ulama yang dipasang di media cetak atau ketika kampanye berlangsung. Misalnya sebuah iklan<sup>8</sup> di media cetak lokal di Aceh menyatakan :

"Ulama dukung Ir. Tarmizi/Tgk. Amirullah ... Kami para ulama se Aceh Utara serta 12 partai politik: Menyatakan dukungan kepada Ir. Tarmizi A. Karim/Tgk. Amirullah (Nomor urut 3) sebagai calon bupati/wakil bupati Aceh Utara. Dukungan ini merupakan hasil musyawarah pada ulama 22 kecamatan mulai dari Pantonlabu s/d Sawang, menilai Tarmizi/Amirullah sosok yang pantas dan mampu memimpin Aceh Utara yang lebih maju dan bermartabat... (adv)"

Selain itu, para kandidat calon bupati/wakil bupati dan kandidat calon gubernur/wakil gubernur dapat kampanyenya seringkali menyertakan ulama sebagai pendukung mereka. Para kandidat tentunya berharap ulama yang mendukung mereka akan diikuti pula oleh para simpatisannya. Misalnya kita lihat lagi iklan sebagai berikut :

"Kami ulama Kabupaten Pidie mendukung Bapak Ir. H. Abdullah Yahya MS dan Drs. M Yusuf Ushaq sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pidie periode 2007-2012", Semoga kelak

<sup>8</sup> *Serambi Indonesia*, tanggal 5 Desember 2006

<sup>3</sup> K.F.H. Van Langen 1986. hlm. 11-12.

menjadi pemimpin yang dapat membangun Pidie dengan tema "bertekad bulat bersama membangun Pidie ke depan Mari kita dukung " ttd Tgk H. Abu Usman Kuta Krueng, Tgk. H. Adnan Batee, Tgk. H. Muhammad Amin Keumala dan Tgk Marzuki (Ketua Forum Komunikasi Anak Dayah Pidie...<sup>9</sup>

Namun demikian tidak sedikit pula ulama-ulama yang tidak berpihak kepada salah satu kandidat calon bupati/wakil bupati atau kandidat calon gubernur/wakil gubernur. Demikian pula lembaga-lembaga keulamaan dan adat yang ada di Aceh, misalnya MAA, MPU Aceh, dan sebagainya. Mereka tidak menyebutkan nama calon, tetapi mereka hanya berharap siapa pun kandidat calon bupati/wakil bupati dan kandidat calon gubernur/wakil gubernur dapat membawa Aceh ke jenjang yang lebih baik.

Masyarakat Aceh dapat lebih aman dan sejahtera. Kalangan ulama dan tokoh adat di Nanggroe Aceh Darussalam mengharapkan kepada para kandidat, baik itu di level gubernur/wakil, bupati/wakil, atau walikota/wakilnya harus siap dan ikhlas jika memang gagal dalam pemilihan. Karena bagaimanapun itu tak lepas dari takdir Allah SWT yang menjadi penentu bagi siapa yang dipercaya menjadi "khalifah" mendatang di Aceh.<sup>10</sup> Pernyataan Nuzzuzahri, Ketua Himpunan Ulama Aceh memberikan gambaran tentang ketidakikutan lembaga ulama mendukung salah seorang kandidat,

"Kami dari kalangan ulama bersikap netral dan menyerahkan pilihan kepada rakyat. Kami hanya mengharap masyarakat bisa

<sup>9</sup> *Serambi Indonesia*, tanggal 7 Desember 2006.

<sup>10</sup> *Serambi Indonesia*, tanggal 4 Desember 2006

masyarakat. Dalam Pilkada tahun 2006 ini, sebagian ulama memang ada yang berpihak pada satu golongan, tetapi tidak sedikit pula mereka yang memposisikan pada sudut netral.

Lembaga-lembaga ulama banyak pula yang memilih netral, hanya saja individu-individu yang menyatakan dukungannya pada calon tertentu.

---

Drs. Agus Budi Wibowo. M.Si adalah Peneliti Muda pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

---

memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani, yaitu pemimpin yang jujur"... tapi kami tegaskan kalangan ulama, khususnya NU di Aceh tak akan masuk dalam politik praktis. Semua kandidat adalah saudara dan kita dekat dengan semuanya, mereka sama-sama orang Aceh".

Hal senada disampaikan ooleh Muslim Ibrahim (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh). "Kami tak mengizinkan anggota kami terlibat dalam Pilkada dengan mengatasnamakan organisasi MPU". Faisal Ali, ketua Rabithah Taliban Aceh (RTA) atau organisasi santri Aceh mengatakan kalangan ulama ingin menyukseskan Pilkada dengan damai dan tidak hendak ikut memecah belah rakyat. "Kalaupun ada ulama yang mendukung salah satu kandidat, itu atas nama pribadi, dan biasanya karena ada kedekatan dengan kandidat". Menurut Faisal, kalangan ulama memilih untuk mengeluarkan sikap atau tausiyah mengenai Pilkada secara umum.<sup>11</sup>

#### Penutup

Perubahan-perubahan peran dan kepemimpinan ulama di Aceh tengah berlangsung. Peran ulama yang begitu dominan pada masa dahulu di setiap kehidupan masyarakat Aceh berangsur surut. Ulama sebagai panutan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini ulama hendaknya menarik diri dalam kehidupan politik praktis. Ia harus berdiri pada posisi netral dalam setiap hiruk pikuk politik yang memihak salah satu golongan. Dalam rangka membangkitkan peran ulama sebagai warasatul anbiya, ulama harus memposisikan sebagai pembimbing dan penuntun

<sup>11</sup> Ahmad Arif. *op.cit.* hlm. 5.

## PUTRO BULUKEH

Cerita Rakyat ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, dalam cerita ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda Banta Saba anak dari Raja Rabinsa dan Permaisuri Afsah. Dia seorang anak yang paling sabar. Ia diusir oleh kedua orang tuanya dengan adiknya yang bernama Nyak Benu Indra dari kerajaan. Karena kedua orang tuanya termakan fitnah oleh kakek dari ayahnya yang mempunyai sifat tidak suka dengan kehadiran Banta Saba dan Nyak Benu Indra ditengah-tengah keluarga besar kerajaan. Sang kakek. Menginginkan sebenarnya kerajaan itu kelak kalau Rabinsa meninggal tampuk kerajaan akan jatuh kepada adiknya Rakasa. Berbulan-bulan Banta Saba dan adiknya Nyak Benu Indra melanglang buana di tengah hutan. Hingga akhirnya Nyak Putroe (putri raja) dari kerajaan Ujung Serangga yang terpikat dengan seorang pemuda tampan Banta Saba dari kerajaan Meuredu yang akhirnya mereka berdua hidup bersama.

Alkisah seorang raja tepatnya sekarang yaitu di Ujung Serangga. Dua mempunyai dua orang Putroe yaitu Putro Bulukeh yang amat dan sangat cantik rupawan serta baik hati, dan satu lagi adiknya Putro Meulu. Putro Bulukeh dijodohkan dengan anak raja seberang dan acara pernikahannya di adakan semeriah mungkin.

Di sebuah rumah hiduplah seorang nenek tua yang bernama Nekni dan seorang pemuda yang tampan rupawan bernama Banta Saba. Seorang pemuda yang diusir dari sebuah kerajaan di Meuredu. Banta Saba diusir akibat melukai punggung kakeknya, karena kakeknya memang sengaja ingin membunuh Banta Saba, karena sang kakek mengharapkan tampuk kerajaan raja Rabinsa dan Permaisuri Afsah jatuh ke tangan adiknya Rakasa bila kelak raja Rabinsa meninggal.

Alangkah kesalnya sang kakek anak yang diidam-idamkan sang permaisuri lahir laki-laki bahkan 2 orang. Yaitu Banta Saba dan Nyak Benu Indra. Sang Kakek memfitnah keberadaan Banta Saba dan Nyak Benu Indra, mereka berdua tidak pantas jadi cucu. Masak neneknya sendiri akan dibunuh. Akhirnya raja dan permaisuri kemakan juga fitnah keji itu.

Akhirnya diusirlah mereka berdua. Banta Saba dengan kesabarannya ia pergi meninggalkan istana dan orang-orang yang dicintainya. Berbulan-bulan dan berbilang

tahun, akhirnya Nyak Benu Indra diambil oleh Syiah dan Banta Saba melanglang buana hingga akhirnya jatuh ke rumah Nekni. Bertanyalah Banta Saba kepada Nekni.

Banta Saba : "Nek, untuk apa bunga itu nenek karang? Bahkan segitu banyak hingga 3 malam berturut-turut nenek terus saja merangkainya...!"

Nekni : "Anak raja Putroe Bulukeh akan menikah, jadi nenek diminta untuk merangkai bunga."

Banta Saba : "Putroe Bulukeh itu Putroe cantik rupawan ya nek...!"

Nekni : "Wahai Banta Saba, Putroe Bulukeh itu seorang gadis yang jelek, dan juga sombong, bahkan masyarakat tidak ada yang menyukainya. Inipun saya lakukan atas permintaan sang baginda raja".

Nekni terus saja menjelek-jelekan Putroe Bulukeh supaya Banta Saba tidak tertarik. Tapi pada adanya.....

Banta Saba: "Nek, biarlah saya ikut membantu nenek merangkainya." • Nekni diam, seraya memberikan jarum, benang dan kertas.

Esok harinya Nekni mengantarkan bunga yang sudah dirangkainya. Hasil karangannya dimasukkan dalam cerana sedangkan bunga rangkaian Banta Saba dimasukkan ke dalam ikatan kain panjang. Bunga yang dalam cerana diserahkan kepada Putroe Bulukeh. Putroe Bulukeh bertanya.

Putroe Bulukeh : "Nekni, apakah

bunga yang anda bawa kepada saya hari ini tidak ada yang lain... ?

Nekni : "Ampun Daulat Tuanku Putroe, hanya ini yang hamba bawa." Putroe Bulukeh : Baiklah Nekni, tapi apa yang ada di dalam ikatan kain mu itu...?"

Nekni terperanjat seraya berkata tergagap-gagap. "A...nu... Tuan Putroe, ini adalah bunga rangkaian Banta Saba".

Putroe Bulukeh menatap bunga itu tergugu. "Wah, indah sekali..... Nek, apakah ditempatmu ada kolam mandi...? Saya dan Meulu sudah lama tidak mandi di kolam."

Nekni : "Ada Tuan Putroe, tapi di depan rumah, airnya tidak terlalu jernih".

Putroe Bulukeh : "Mungkin dalam beberapa hari ini kami kesana".

Nekni : "Baiklah Tuanku, hamba pamit dulu.... Putroe Bulukeh : "Nekni, jangan lupa ucapkan terima kasih saya untuk Banta Saba dan salam untuknya." Selang beberapa hari Putroe Bulukeh dan Putroe Meulu pergi ke tempat pemandian di depan rumah, Nekni. Secara diam-diam Putroe Bulukeh mengendap-ngendap mendengarkan syair yang dibawakan oleh Banta Saba.

*Sibeubehak gampong jarak han troh  
Ion woe*

*Dakna bulee Ion teureubang  
Mangat rijang troh u nanggroe  
Gampong di Ion di crep mugrep  
Mata uroe hudep Ion boh keu tanda  
Ku ek ku tron ku duk bak reumyen  
Po ma geukheun weuh that hatee  
Jampang ureo cit mak meugang  
Teujak teudong Ion dipante  
Adak dijok sina bacut  
Kamoe cut-cut woe pajoh lee  
Adak dibudoh karong ngon wali  
Asa uroe baroe teubadeh  
Adak dime sie sigepang  
Sajan pisan ke sitangke  
Podu Ion lale seudeh dibarat  
Podu Ion that buta hatee  
Podu Ion lale ngon hareuta  
Ke ulon nyon han geu ingat lee*

Putroe langsung mengetuk pintu rumah Nekni, dan Banta Saba langsung naik ke pagu rumah Nekni membukakan daun

pintu rumahnya.

Nekni : "Ada apa gerangan wahai Tuanku Putroe Bulukeh datang ke tempat reot hamba...?"

Putroe Bulukeh : Nek, saya mencium buah nangka dari kejauhan dan begitu membuat saya ingin memakannya".

Nekni : "Tapi Tuan Putroe disini tidak ada buah nangka lagi, yang ada hanyalah kulitnya saya karena kemarin sudah habis".

Putroe Bulukeh : "Nek jangan bohong, baunya masih sangat segar dan saya jadi ingin mencicipinya". Lalu Putroe menggunakan ilmunya membuat Nekni nggak berhenti-henti ke WC untuk buang air besar.

Putroe naik ke atas pagu memakan buah nangka dan memandang ke satu arah yaitu Banta Saba tidur dengan menutup badannya dengan kain panjang. Putroe menukar kain panjang milik Banta Saba dengan miliknya. Putroe lalu pulang tanpa pamitan pada nenek.

Banta Saba memandang kain panjangnya sudah bertukar. Disitulah timbul niat Banta Saba untuk menikahi Putroe Bulukeh. Makanya pada malam hari Banta Saba terbang dengan Guda Cahi Kertah. Putroe niatnya pun sama, dia langsung jatuh hati kepada Banta Saba dengan rangkaian bunganya dan syair-syair Banta Saba.

Sudah 2 malam berturut-turut Banta Saba masuk ke kamar Putroe, setelah Banta Saba masuk Putroe langsung memeluk Banta Saba. Akhirnya Banta Saba meronta dan lolos melarikan diri dengan kagetnya, jatuhlah salah satu buah baju Banta Saba akibat tarikan Putroe Bulukeh.

Keesokan harinya Putroe Meulu bertanya pada Putroe Bulukeh dari lantai bawah:

Putroe Meulu : "Wahai kakanda, siapakah gerangan punya kancing baju ini" tanyanya dari kejauhan.

Putroe Bulukeh : "Saya adinda Meulue, bawa kemari kancing baju itu." Putroe Meulu bahkan berjalan makin menghindari kakaknya mengantarkan kancing baju itu kepada ayahandanya.

## Cerita

"Daulat ayahanda tercinta, ananda mau memperlihatkan sesuatu"

Baginda Raja : "Kancing baju...? Di mana kamu ambil Meulue?" sambil melihat kancing baju itu.

Putroe Meulu : "Saya mengutipnya di samping ranjang kakanda Bulukeh".

Baginda/Permaisuri : "Apa.....?"

Baginda : "Kurang ajar, siapa yang sangat lancang sekali berani menginjak mahligaku tanpa tata krama. Hulubalang ..... " teriak raja "Kumpulkan rakyat semesta, katakan saya mau melihat orang yang telah berani menginjak-injak mahligai saya." Hulubalang : "Siap Baginda," sambil berlalu.

Setelah diperiksa dan diinterogasi satu persatu, tak ada satu rakyat pun yang kenal dengan kancing baju tersebut. Sang raja mengerahkan prajurit untuk menggeledah setiap rumah, tibalah ke rumah Nekni, ditemukanlah Banta Saba di sana. Dan langsung diseret Banta Saba ke kerajaan. Dihadapan raja Banta Saba langsung mengaku bahwa kancing baju itu memang miliknya.

Raja murka dan menyuruh membunuh Banta Saba. Alangkah kagetnya prajurit. Banta Saba mempunyai ilmu kebal tubuh, dari pagi dia dilempari batu tapi tak mengeluarkan darah. Tiba waktu shalat Banta Saba minta waktu untuk menghadap Sang Khalik.

Setelah shalat terjadilah perdebatan yang seru antara Banta Saba dengan beberapa Hulubalang.

Banta Saba : "Saya tidak akan kemana-mana, saya hanya ingin naik sebentar ke atas pohon ketapang itu."

Hulubalang I : "Tidak saya ijin karena kamu hai Banta Saba hanya ingin menipu kami."

Banta Saba dengan wajah memelas memohon, "Wahai Hulubalang yang setia, mana mungkin saya bisa melarikan diri di atas pohon kayu itu.

Hulubalang II : "Hulubalang, kalau kita pikir ia juga, bagaimana cara Banta Saba melarikan diri di atas pohon ketapang itu."

Hulubalang I : "Baiklah, tapi jangan lama apalagi mau mengibuli kami."

Banta Saba memanjat pohon ketapang sambil bermohon, "Cada Guda Cahī Kertas hadirilah," dengan secepat kilat Cada Guda Cahī Kertas tiba. Maka naiklah Banta Saba di atasnya lalu menghilang secepatnya.

Hulubalang I : "Kurang ajar," dia memaki-maki para Hulubalang lain.

Akhirnya terjadilah saling menyalahkan satu sama lain, salah seorang Hulubalang mengeluarkan idenya yaitu menyembelih seekor kambing dan darahnya diambil untuk diperlihatkan pada Sang Baginda, dan mengatakan bahwa darah itu adalah darah Banta Saba.

Acara pernikahan Putroe Bulukeh terus saja berlangsung dengan meriah, sang Putroe menangis tersedu-sedu sambil memarahi adiknya Putroe Meulu.

Putroe Bulukeh : "Semua ini salahmu Meulu. Coba kancing baju itu kamu berikan kepadaku pasti tidak begini kejadiannya."

Putroe Meulu : "Maafkan saya kakanda Bulukeh." seraya menunduk ketakutan.

Putroe Bulukeh : "Awas kalau terjadi apa-apa pada Banta Saba, kamu akan rasakan akibatnya Meulu."

Putroe Meulu diam tak berkutik. Tiba-tiba tanpa diduga Banta Saba telah berdiri di samping jendela kamar Putroe Bulukeh. Ia langsung memanggil Putroe untuk diajak pergi meninggalkan kerajaan. Spontan Putroe melompat dalam Cada Guda Cahī Kertas. Merekapun pergi meninggalkan istana tanpa pikir panjang. Putroe Meulu hanya bisa memandang.

Di istana Sang Baginda Raja marah besar setelah tahu Putroe Bulukeh dibawa lari oleh Banta Saba. Dia kembali mengerahkan seluruh prajurit istana dan rakyatnya untuk mengejar Putroe Bulukeh. Setelah sehari-hari mereka mencari Banta Saba dan Putroe Bulukeh, akhirnya menemukan Banta Saba yang sedang tertidur pulas di bawah pohon kayu, sedangkan Putroe Bulukeh tidak terlihat karena Putroe dimasukkan oleh Banta Saba ke dalam pohon kayu.

Spontan prajurit yang menemukan

## Cerita

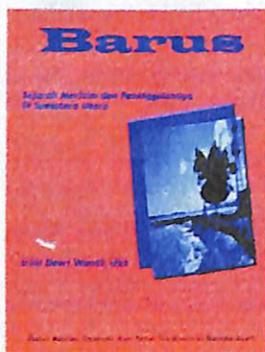
Turunlah seorang Syiah, dia berkata : "Wahai Putroe Bulukeh, jangan engkau menangis sebab itu tak ada gunanya. Saya akan menghidupkan Banta Saba. Lalu Syiah membaca doa-doa, akhirnya Banta Saba membuka matanya.

Putroe Bulukeh berteriak gembira seraya memeluk Banta Saba yang amat dicintainya. Akhirnya Banta Saba dan Putroe Bulukeh pulang ke Meuredu dengan Cada Guda Cahī Kertas.

Disadur kembali dari :

Junnasrida, A.Ma

Guru SD Negeri 2 Alue Jeureujak  
Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat  
Daya.



TERBITAN

Dari  
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN  
NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH

**Barus : Sejarah Maritim dan Peninggalannya Di Sumut, Iriani Dewi Wanti,  
dkk, 78 hlm, 2006**

Semenjak abad XVI Barus sudah dikenal sebagai pusat pelayaran dan perdagangan, terutama kapur Barus di wilayah pantai barat Sumatera. Sebagai kota maritim yang pernah mengalami kejayaan, tentu banyak meninggalkan peninggalan sejarah yang bernuansa kemaritiman. Untuk tidak menjadi sekedar kenangan sejarah masa lalu, harus dimanfaatkan sebagai pendukung kepariwisataan. Itulah di antara permasalahan yang diangkat dalam buku ini.(sdr)

*Pilkada NAD 11 Desember 2006  
yang berlangsung dengan  
aman, damai dan demokratis  
membuahkan harapan menuju  
masa depan Aceh yang sejahtera*



Kepala,

**Drs. H. Shabri A**